

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN**



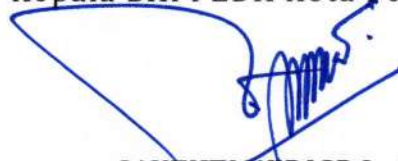
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bappeda Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 3 Juli 2023
Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan



CAYEKTI WIDIGDO, AP.,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19750729 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
C Capaian Anggaran	7
BAB III PENUTUP	8
A Kesimpulan	8
B Rekomendasi	8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023	3
Tabel 2.2. Pengukuran dengan Skala Ordinal	5
Tabel 2.3. Pengukuran Kinerja Kepala Bappeda Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2023	5
Tabel 2.4. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi	2
---------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
4. pengkoordinasian perencanaan pembangunan yang bersiat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan dari Perangkat Daerah Provinsi dan/atau instansi Pemerintah Pusat;
5. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan;
7. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
8. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
9. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembidaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
10. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

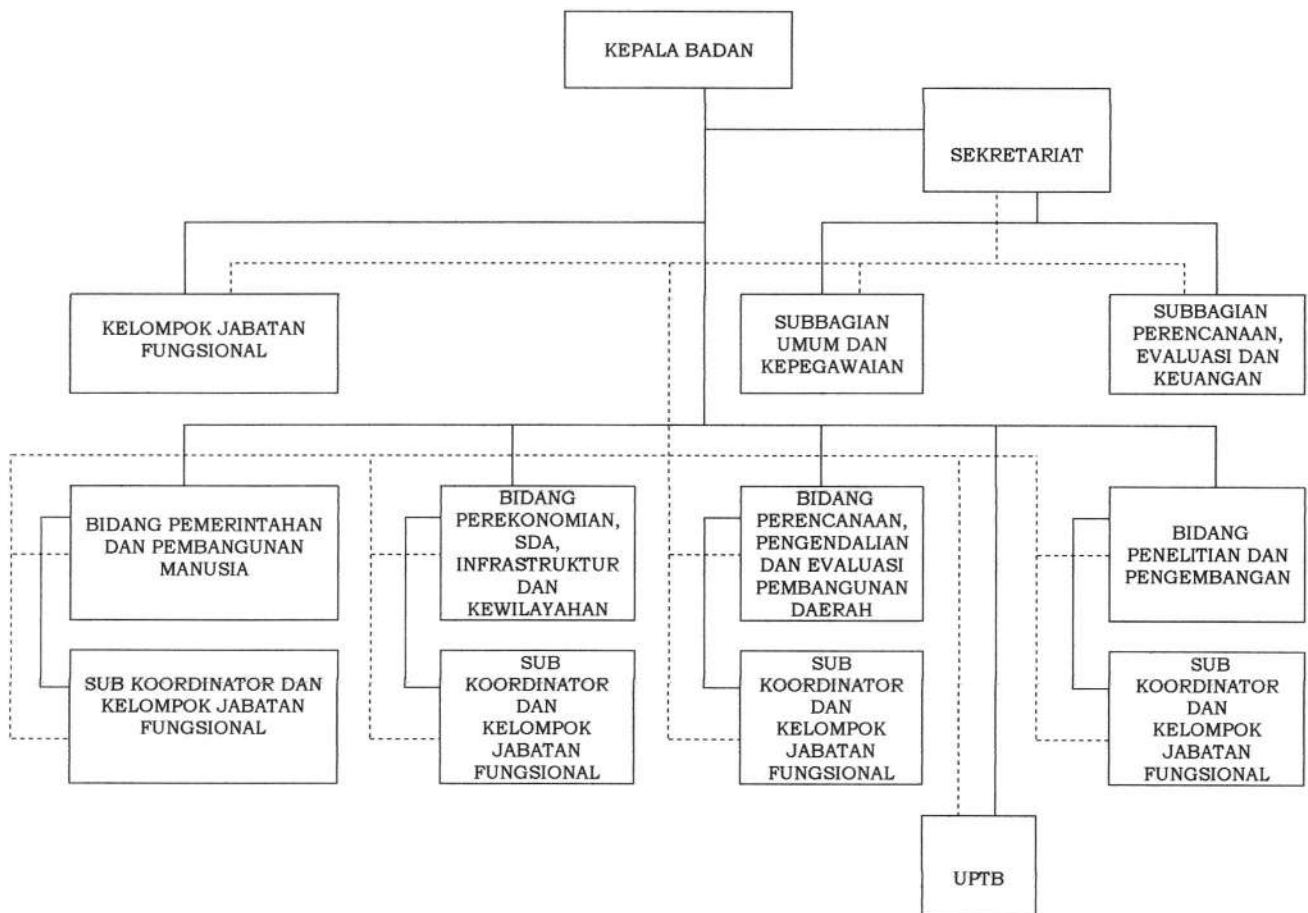
B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD;	89
		2. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;	100%
		3. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;	100%
		4. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah;	100%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan melalui program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi	5. Persentase program RKPD selaras dengan Program RPJMD;	100%

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
	Perencanaan Pembangunan Daerah	6. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu;	100%
		7. Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu;	100%
		8. Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu;	100%
		9. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemsosbud;	100%
		10. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian;	100%
		11. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur Wilayah;	100%
3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	12. Persentase laporan hasil litbang	100%
		13. Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD;	100%
		14. Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan;	100%
		15. Skor Capaian Nilai RIDA (SIDA)	73

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Strategis Dan Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	89	-	n/a	-
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja;	100%	50%	42,44%	84,88%
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa	100%	50%	34,80%	69,60%

No	Sasaran Strategis Dan Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II	% Capaian
		penunjang urusan pemerintah daerah;				
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah;	100%	50%	50%	100%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan melalui program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD	100%	-	-	-
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu;	100%	-	-	-
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu;	100%	50%	50%	100%
		Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu;	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemsosbud;	100%	-	-	-
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian;	100%	-	-	-
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur Wilayah;	100%	-	-	-
3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan melalui Program	Persentase laporan hasil litbang	100%	-	-	-
		Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan	100%	-	-	-

No	Sasaran Strategis Dan Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II	% Capaian
	Penelitian dan Pengembangan Daerah	RPJMD;				
		Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan;	100%	-	-	-
		Skor Capaian Nilai RIDA (SIDA)	73	-	n/a	-
	Rata-rata Capaian					90,90%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebesar 90,90% dengan kategori "Sangat berhasil"

Adapun faktor-faktor pendukung capain kinerja antara lain:

1. Ketersediaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
2. Dukungan dan Kerjasama yang baik dengan stakeholder dan masyarakat pada umumnya.

Adapun faktor-faktor penghambat capaian kinerja antara lain :

1. Pengadaan peralatan yang bersumber dari dana Bankeu belum selesai dilaksanakan.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Program	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan II (Rp)	Realisasi s/d Triwulan II (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.452.740.000,-	3.175.660.996,-	2.567.789.808,-	80,85%

No	Program	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan II (Rp)	Realisasi s/d Triwulan II (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten/Kota				
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	957.974.000,-	661.402.000,-	297.719.487,-	45,01%
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	709.794.000,-	539.309.000,-	108.105.226,-	20,04%
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.066.825.000,-	265.873.000,-	86.776.425,-	32,63%
	JUMLAH :	8.187.333.000,-	4.642.244.996,-	3.060.390.946,-	
Rata-rata Capaian					62,92%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 62,92%.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 62,92%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan II sebesar 90,90%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 37,89%

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 90,90%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 65,92 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 38,89%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pencermatan atas program/kegiatan/pekerjaan yang harus segera dimulai agar dapat terselesaikan sesuai perencanaan pada Triwulan berjalan pada tahun-tahun selanjutnya.
2. Perlunya koordinasi yang lebih intens terkait dengan jadwal pencairan anggaran agar dapat sejalan dengan pelaksanaan program/ kegiatan/ pekerjaan.
3. Perlunya pengawalan dalam pembagian tugas agar setiap personil dapat secara proposial dalam berkontribusi bagi pencapaian target kinerja.

Pekalongan, 03 Juli 2023

Mengetahui

WALI KOTA,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE


Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan


CAYEKTI WIDIGDO, AP., MSI
NIP. 19750729 199412 1 001

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
SEKRETARIS BAPPEDA**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Barokah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Bappeda Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat pada umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sekretaris BAPPEDA Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *outcomes*.

Di sisi yang lain, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Sekretaris BAPPEDA Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

SEKRETARIS BAPPEDA



UJIAN TO PURWANTO, S.SiT., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197903082005021002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas dan Fungsi Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	7
BAB III PENUTUP	9
A Kesimpulan	9
B Rekomendasi	9

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2023	3
Tabel 2.2 Pengukuran Skala Ordinal	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Sekretaris Triwulan II Tahun 2023	6
Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023	7

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat BAPPEDA Kota Pekalongan	2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan, Sekretariat BAPPEDA Kota Pekalongan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif.

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Sekretariat BAPPEDA Kota Pekalongan, menyelenggarakan fungsi :

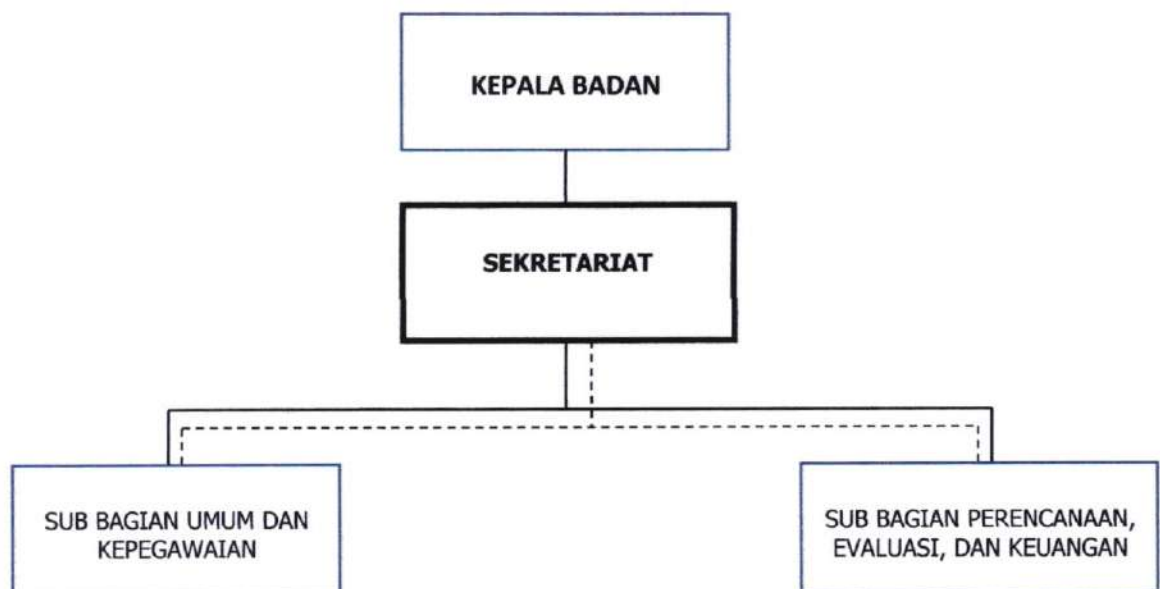
- a. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan anggaran di lingkup Badan;
- c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah pada lingkup Badan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkup Badan;
- e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkup Badan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah di lingkup badan;
- h. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);

- j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Dalam struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan, Sekretaris Bappeda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan. Sekretaris BAPPEDA membawahi dua Kepala Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda. Secara lengkap, struktur organisasi jabatan Sekretariat BAPPEDA Kota Pekalongan, sebagaimana dalam gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sekretariat BAPPEDA Kota Pekalongan



Sumber : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Pada APBD Tahun Anggaran 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris BAPPEDA Kota Pekalongan disusun dan dituangkan ke dalam Kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris
Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
2	Tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Tercapainya administrasi kepegawaian daerah perangkat	Persentase Administrasi Perangkat Daerah Ketercapaian Kepegawaian	100%
4	Tercapainya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Ketercapaian	100%
5	Tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ketercapaian	100%
6	Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ketercapaian	100%

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretaris Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

SKALA ORDINAL	PREDIKAT / KATEGORI
90,01 sd lebih	Sangat tinggi / sangat berhasil
75,1 sd 90	Tinggi / berhasil
65,1 sd 75	Sedang / Cukup berhasil
50,1 sd 65	Rendah / Tidak berhasil
0 sd 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Sekretaris Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sekretaris Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Tercapainya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	50%	50%	100
2	Tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	50%	50%	100
3	Tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	0	-
4	Tercapainya administrasi umum perangkat	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	50%	50%	100
5	Tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50%	50%	100
6	Tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50%	50%	100
		RATA-RATA CAPAIAN				100

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Sekretaris Bappeda Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2023 dari 6 kegiatan dengan 6 (enam) indikator, rata-rata capaian kinerjanya 100% atau dengan kategori "sangat berhasil"

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan II ini adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama yang baik dengan seluruh pegawai Bappeda, maupun stake holder terkait;
2. Pelaksanaan pekerjaan rutin sesuai perencanaan, sehingga tercapai sesuai dengan target.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama yang lebih baik lagi dengan seluruh pegawai, ASN dan NON ASN, serta stake holder terkait
2. Pekerjaan dilaksanakan sesuai target kinerja yang sudah ditentukan pada setiap triwulan.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d TW II (Rp)	Realisasi s/d TW II (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4) * 100\}$
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	16.000.000,-	8.055.000,-	3.923.900,-	48,71
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	4.610.137.000,-	2.658.865.996,-	2.253.269.289,-	84,75
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	5.000.000,-	0,-	0,-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	553.241.000,-	375.558.000,-	200.840.050,-	53,48
5	Penyediaan Jasa Penunjang	166.570.000,-	85.484.000,-	73.466.457,-	85,64

	Urusan Pemerintahan Daerah.				
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.792.000,-	47.698.000,-	36.290.112,-	76,08
	TOTAL :	5.452.740.000,-	3.175.660.996,-	2.567.789.808,-	
	Rata-rata penyerapan anggaran				80,86

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan II adalah sebesar 80,86 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 80,86%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan II sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 23,67 %.

Efisiensi tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan, secara keuangan belum dipertanggungjawabkan seluruhnya sehingga realisasi keuangan belum mencerminkan penggunaan anggaran sepenuhnya;
2. Kegiatan dilaksanakan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tercapai 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 80,86%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 23,67 %.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program pada Sekretariat BAPPEDA Kota Pekalongan pada Triwulan II Tahun 2023 adalah **Perlu dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan lebih baik lagi baik kinerja maupun keuangan, agar setiap target triwulanan agar dapat dipertahankan dan sebisa mungkin ditingkatkan kinerjanya di setiap triwulannya.**

Pekalongan, 03 Juli 2023

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KOTA PEKALONGAN



CAYEKTI WIDIGDO, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19750729 199412 1 001

SEKRETARIS BAPPEDA
KOTA PEKALONGAN



UJIAN TO PURWANTO, S.SiT., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197903082005021002

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

Kepala Bidang Perekonomian, SDA,
Infrastruktur, dan Kewilayahan


IMRON ROSYIDI, S. Pi. M. App. Sc.

Pembina

NIP. 19780529 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
DAFTAR TABEL	lii
DAFTAR GAMBAR	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	3
C Capaian Anggaran	4
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BAPPEDA, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

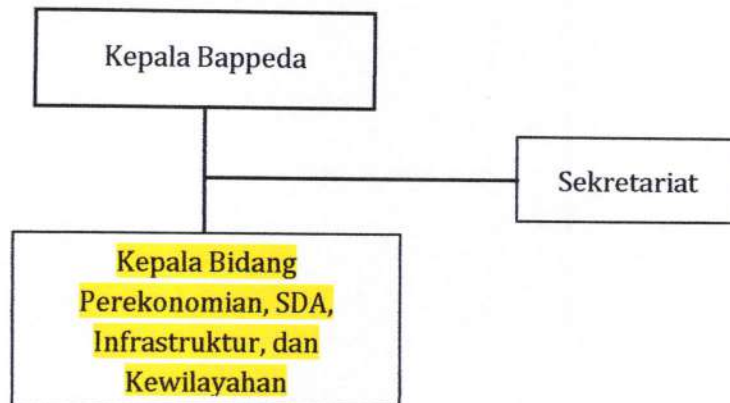
1. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
2. Penganalisaan dan pengkajian perencanaan kewilayahan;
3. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
4. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah di provinsi lingkup Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. Pengoordinasian evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
7. Pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
8. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

9. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terfasilitasinya dan terlaksananya monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase kegiatan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dilaksanakan	100%
2	Terkoordinasinya perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
1	Terfasilitasinya dan terlaksananya monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase kegiatan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dilaksanakan	100%	50%	50%	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
2	Terkoordinasinya perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	50%	50%	100
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil"

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target Triwulan II (Rp)	Realisasi Triwulan II (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Rp 177.400.000	Rp 133.700.000	Rp 25.532.613	19,10 %
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp 321.930.000	Rp 261.906.000	Rp 29.845.000	11,40 %
Rata-rata Capaian					13,99 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan II adalah sebesar 15,25 %.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 13,99%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap target kinerja kegiatan per triwulan agar senantiasa selaras dan relevan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan dan Pagu Anggaran mendukung dan selaras dengan Indikator Kinerja Unit Kerja (Bappeda).

Pekalongan, 03 Juli 2023

Mengetahui

Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan,



CAYEKTI WIDIGDO, A.P., M. Si

NIP. 19750729 199412 1 001

Kepala Bidang Perekonomian, SDA,
Infrastruktur, dan Kewilayahan,



IMRON ROSYIDL, S. Pi. M. App. Sc.

NIP. 19780529 200212 1 003

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA



BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kota Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA



Dra. INDAH BUDIARTI, MM

Pembina

NIP. 19701129 199703 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	3
C Capaian Anggaran	4
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kota Pekalongan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

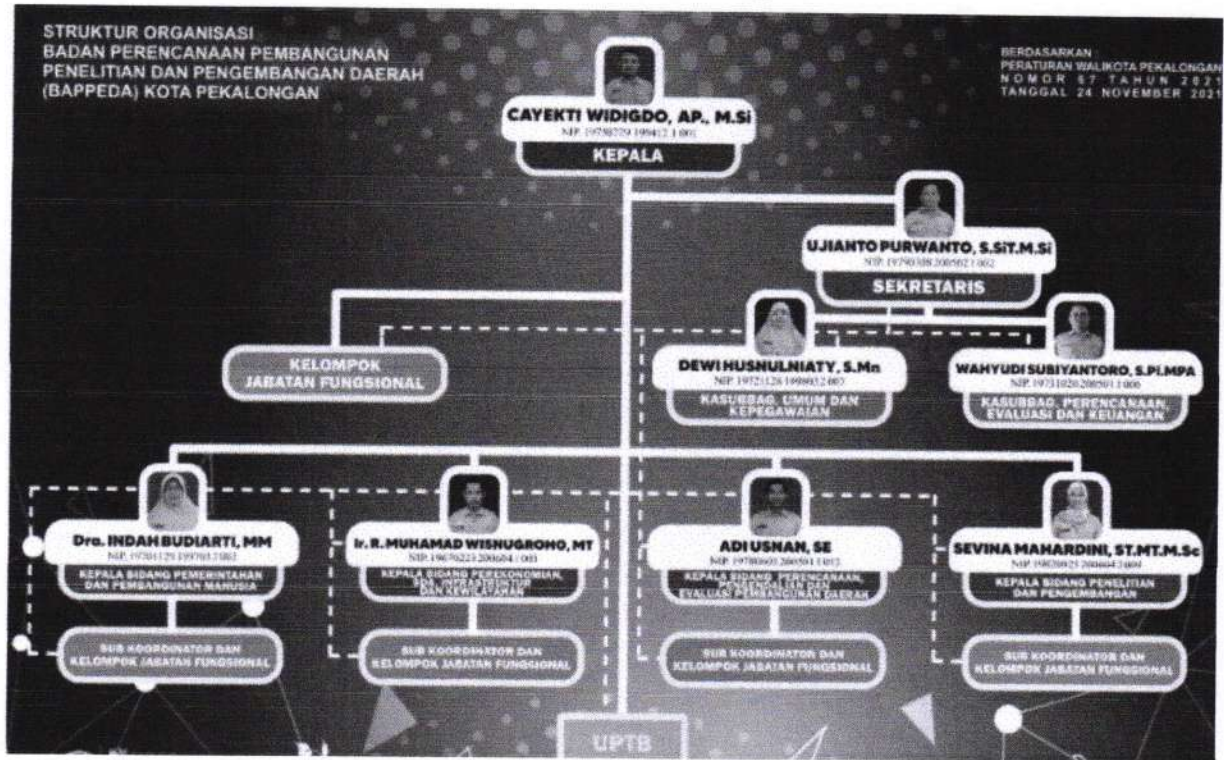
Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
3. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
4. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah di provinsi lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. pengoordinasian evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
6. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
7. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
8. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappeda Kota Pekalongan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kota Pekalongan

Susunan Organisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kota Pekalongan terdiri:

- Sub Koordinator Bidang;
- Kelompok Jabatan Fungsional;
- Analisis Perencana;
- Pranata Komputer.

Sub Koordinator, Kelompok Jabatan Fungsional, membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Kota Pekalongan, sedangkan Analisis Perencana dan Pranata Komputer Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang optimal	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dilaksanakan	100%

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bappeda Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	100%	0%	0%	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
		Manusia dilaksanakan				
	<i>Rata-rata Capaian</i>					100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pekalongan adalah sebesar 100 % dengan kategori “Sangat Tinggi/Sangat Berhasil”.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target Triwulan II (Rp)	Realisasi Triwulan II (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	210.464.000,-	147.553.000	77.005.000	37%
Rata-rata Capaian					37%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan II adalah sebesar 37 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 37 %, namun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan II sebesar 0 %, hal ini disebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia telah dilakukan pada triwulan I namun belum sepenuhnya bisa dilaporkan mengingat laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah seluruh kegiatan dilaksanakan yaitu di akhir tahun atau triwulan ke IV di tahun berjalan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 0 % , sedangkan realisasi anggaran sebesar 37 %, hal ini disebabkan karena kegiatan pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia berdasarkan target kinerja dilaksanakan dan dilaporkan pada triwulan ke empat atau di akhir tahun, sedangkan realisasi kegiatan yang telah terlaksana digunakan untuk mensupport kegiatan penyusunan dokumen perencanaan anggaran di tahun berjalan maupun tahun depan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

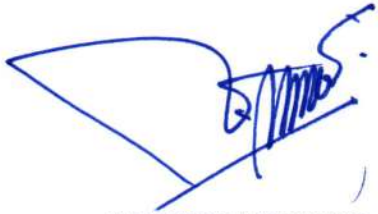
1. "Perlu dipertahankan untuk capaian kinerja pada triwulan-triwulan berikutnya sehingga target 100% pada akhir semester bisa terealisasi"
2. "Diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi secara intens agar pelaksanaan kinerja tidak menumpuk pada akhir tahun"

3. “diperlukan evaluasi target dan kinerja serta penjadwalan ulang terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada semester berikutnya maupun di tahun mendatang”.

Pekalongan, 03 Juli 2023

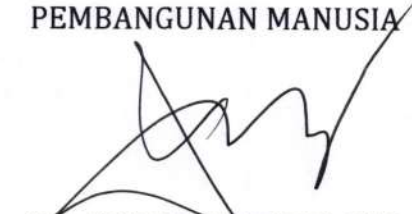
Mengetahui

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN,



CAYEKTI WIDIGDO, AP, MSi
Pembina Utama Muda
NIP : 19750729 199412 1 001

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA



Dra. INDAH BUDIARTI, MM
Pembina
NIP. 19701129 199703 2 002

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MADYA



SUTOTO, ST, MT
NIP. 19710217 199603 1 001

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023

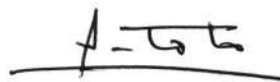
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Perencana Ahli Madya Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Perencana Ahli Madya mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Perencana Ahli Madya melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 3 Juli 2023

Perencana Ahli Madya,



Sutoto, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19710217 199603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
BAB III PENUTUP	7
A Kesimpulan	7
B Rekomendasi	7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Tahun 2023.....	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal.....	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan II	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Pekalongan	2
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

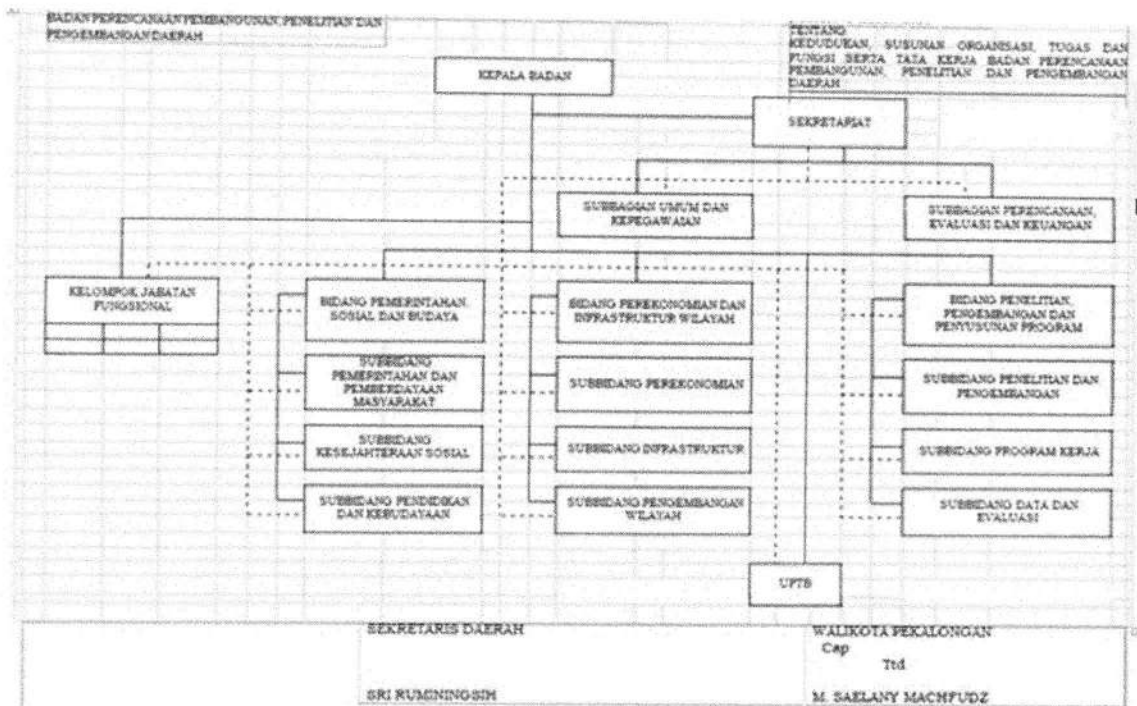
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, tugas Jabatan Fungsional Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

- a. identifikasi masalah/isu strategis;
- b. penyusunan kebijakan rencana pembangunan;
- c. adopsi dan legitimasi rencana pembangunan;
- d. pelaksanaan rencana pembangunan; dan
- e. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Perencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perencanaan di lingkungan Instansi Pemerintah. Perencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perencana. Kedudukan Perencana ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Fungsional Perencana menjadi bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Pekalongan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Perencana Ahli Madya Tahun 2023 Sutoto, ST, MT, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perencana Ahli Madya
Tahun 2023

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun rekomendasi kebijakan strategis yang berkualitas	Jumlah Makalah Kebijakan (<i>Policy Brief</i>) yang tersusun	4 makalah
2	Menyusun kebijakan strategis/program jangka panjang yang berkualitas	Jumlah dokumen kebijakan strategis/program jangka panjang yang tersusun	2 dokumen
3	Menyusun telaahan lingkup sektoral/regional pada bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Jumlah laporan telaahan lingkup sektoral/regional bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM yang tersusun	6 laporan
4	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang berkualitas	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang tersusun	4 laporan

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5	Menyusun telaahan lingkup sektoral/regional pada bidang Litbang dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Jumlah laporan telaahan lingkup sektoral/regional bidang Litbang yang tersusun	2 laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Perencana Ahli Madya Triwulan I Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Perencana Ahli Madya Triwulan I Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Perencana Ahli Madya
Triwulan II Tahun 2023

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan II	Realisasi s.d. Triwulan II	% Capaian
1	Menyusun rekomendasi kebijakan strategis yang berkualitas	Jumlah Makalah Kebijakan (<i>Policy Brief</i>) yang tersusun	4 makalah	1 makalah	1 makalah	100
2	Menyusun kebijakan strategis/program jangka panjang yang berkualitas	Jumlah dokumen kebijakan strategis/progrm jangka panjang yang tersusun	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
3	Menyusun telaahan lingkup sektoral/regional pada bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Jumlah laporan telaahan lingkup sektoral/regional bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM yang tersusun	6 laporan	1 laporan	1 laporan	100
4	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan	4 laporan	2 laporan	2 lapoarn	100

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan II	Realisasi s.d. Triwulan II	% Capaian
	berkualitas	rencana pembangunan yang tersusun				
5	Menyusun telaahan lingkup sektoral/regional pada bidang Litbang dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Jumlah laporan telaahan lingkup sektoral/regional bidang Litbang yang tersusun	2 laporan	0	0	-
Rata-rata Capaian						100

Hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Perencana Ahli Madya adalah sebesar 100%, dengan kategori "Sangat Berhasil".

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan II ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan sehingga Fungsional Perencana dapat menjalankan tugas tepat waktu.
2. Ketersediaan sumberdaya yang memadai sehingga Fungsional Perencana dapat menjalankan tugas dengan baik.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Perencana Ahli Madya adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Tinggi/Sangat Berhasil"

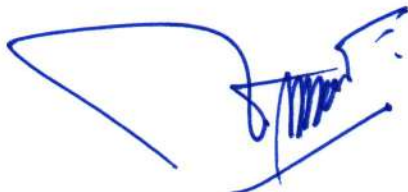
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Perencana Ahli Madya Triwulan II Tahun 2023 adalah setiap kegiatan dapat konsisten dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 3 Juli 2023

Mengetahui

Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan



CAYEKTI WIDIGDO, AP, M.Si
NIP. 19750729 199412 1 001

Perencana Ahli Madya,



Sutoto, ST, MT
NIP. 19710217 199603 1 004

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MADYA



Vita Marshinta Devi, ST
NIP. 19720312 199803 2 007

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN 2023

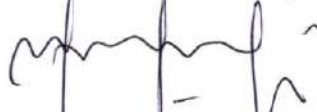
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Perencana Ahli Madya Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Perencana Ahli Madya mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Perencana Ahli Madya melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 3 Juli 2023

Perencana Ahli Madya



Vita Marshinta Devi, ST

(Pembina Tingkat I)

NIP. 19720312 199803 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

DAFTAR TABEL

Tabel2.1.	Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Tahun 2023	2
Tabel 2.2.	Pengukuran dengan Skala Ordinal	3
Tabel2.3.	Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan II Tahun 2023	3

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1. Struktur Organisasi	1
---------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

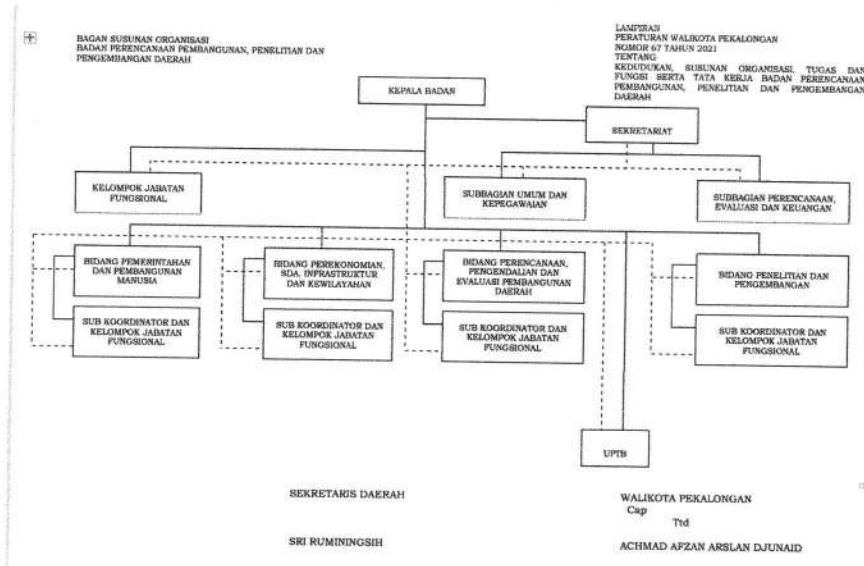
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rekomendasi kebijakan strategis;
2. Menyusun perencanaan kebijakan/ program strategis jangka menengah;
3. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional pada bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
4. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional bidang litbang dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan; dan
5. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Fungsional Ahli Madya
Tahun 2023

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun rekomendasi kebijakan strategis	Jumlah makalah yang tersusun	4 makalah
2	Menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah	Jumlah dokumen yang tersusun	4 dokumen
3	Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional pada bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	3 laporan
4	Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional bidang litbang dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	1 laporan
5	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	4 laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan II Tahun 2023

No.	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
1	Menyusun rekomendasi kebijakan strategis	Jumlah makalah yang tersusun	4 makalah	1	1	100
2	Menyusun perencanaan kebijakan/ program strategis jangka menengah	Jumlah dokumen yang tersusun	4 dokumen	1	1	100
3	Melakukan telaahan lingkup ectoral/regional pada bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi ublic lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	3 laporan	1	1	100
4	Melakukan telaahan lingkup ectoral/regional pada bidang Litbang dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi ublic lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	1 laporan	0	0	-
5	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	4 laporan	2	2	100
Rata-rata Capaian						100

Hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya adalah sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi/ sangat berhasil

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah:

1. Penyusunan rencana kegiatan telah memperhatikan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang direncanakan.
3. Ketersediaan SDM fungsional perencana sesuai dengan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya adalah sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi/ sangat berhasil.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap target kinerja kegiatan per triwulan agar senantiasa selaras dan relevan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan mendukung dan selaras dengan Indikator kinerja Unit Kerja (Bappeda).
3. Perlu ditingkatkan indikator kinerjanya, sehingga output kegiatan dapat mendukung indicator Unit Kerja (Bappeda).

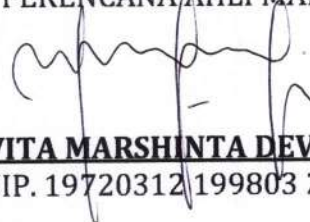
Pekalongan, 3 Juli 2023

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KOTA PEKALONGAN,



CAYEKTI WIDIGDO. AP. M.Si
NIP. 19750729 199412 1 001

FUNGSIONAL
PERENCANA AHLI MADYA,



VITA MARSHINTA DEVI. ST
NIP. 19720312 199803 2 007

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
"FUNGSIONAL PERENCANA MUDA"



TRI PUJI ASTUTI, ST., M.Eng.
NIP. 19800219 200604 2 009

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Fungsional Perencana Muda Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong meningkatkan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Fungsional Perencana Muda mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Fungsional Perencana Muda melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 31 Juli 2023
Fungsional Perencana Muda



TRI PUJI ASTUTI, ST., M.Eng.

Penata Tk. I

NIP. 19800219 200604 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Jabatan	1
B. Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A. Perjanjian Kinerja	2
B. Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A. Kesimpulan	5
B. Rekomendasi	5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Muda Tahun 2023	2
Tabel 2.2	Pengukuran dengan Skala Ordinal	3
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Muda Triwulan II Tahun 2023	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kelompok Jabatan Fungsional Tahun 2023	1
------------	--	---

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Fungsional Perencana Muda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Muda Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyajikan data dan informasi.	Jumlah data yang tersedia	14 laporan
2	Menyusun rekomendasi kebijakan strategis.	Jumlah makalah yang tersusun	1 makalah
3	Melakukan telaahan lingkup sektoral / regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.	Jumlah laporan yang tersusun	4 laporan
4	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.	Jumlah laporan yang tersusun	12 laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Fungsional Perencana Muda Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Fungsional Perencana Muda Triwulan I Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Muda
Triwulan I Tahun 2023

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II	% Capaian
1	Menyajikan data dan informasi	Jumlah laporan yang tersedia	14 laporan	7	7	100,00
2	Menyusun rekomendasi kebijakan strategis	Jumlah makalah yang tersusun	1 makalah	0	0	-
3	Melakukan telaahan lingkup sektoral / regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi survey lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	4 laporan	2	2	100,00
4	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	12 laporan	6	4	66,67
Rata-Rata Capaian						88,89

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Fungsional Perencana Muda adalah sebesar 88,89 % dengan kategori Tinggi / Berhasil.

Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah:

1. Penyusunan rencana kegiatan telah memperhatikan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang direncanakan.
3. Ketersediaan SDM fungsional perencana sesuai dengan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan.

Sedangkan faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja adalah karena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Fungsional Perencana Muda adalah sebesar 88,89 % dengan kategori Tinggi / Berhasil.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Fungsional Perencana Muda Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap target kinerja kegiatan per triwulan agar senantiasa selaras dan relevan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Penetapan indikator kinerja kegiatan mendukung dan selaras dengan indikator kinerja Unit Kerja (Bappeda).
3. Perlu ditingkatkan indikator kinerjanya, sehingga output kegiatan dapat mendukung indikator Unit Kerja (Bappeda).

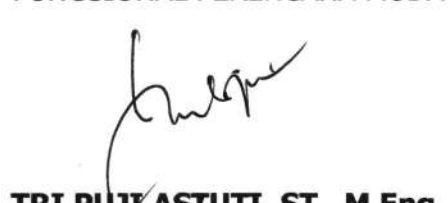
Pekalongan, 31 Juli 2023

Mengetahui,

KABID PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA
BAPPEDA KOTA PEKALONGAN


Dra. INDAH BUDIARTI, MM.
NIP. 19701129 199703 2 002

FUNGSIONAL PERENCANA MUDA


TRI PUJI ASTUTI, ST., M.Eng.
NIP. 19800219 200604 2 009

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MADYA



Slamet Miftakhudin, ST
NIP. 19781222 200501 1 003

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Perencana Ahli Madya Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Perencana Ahli Madya mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Perencana Ahli Madya melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 3 Juli 2023

Perencana Ahli Madya



Slamet Miftakhudin. ST

(Pembina)

NIP. 19781222 200501 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

DAFTAR TABEL

Tabel2.1.	Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Tahun 2023	2
Tabel 2.2.	Pengukuran dengan Skala Ordinal	3
Tabel2.3.	Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan II Tahun 2023	3

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1. Struktur Organisasi	1
---------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

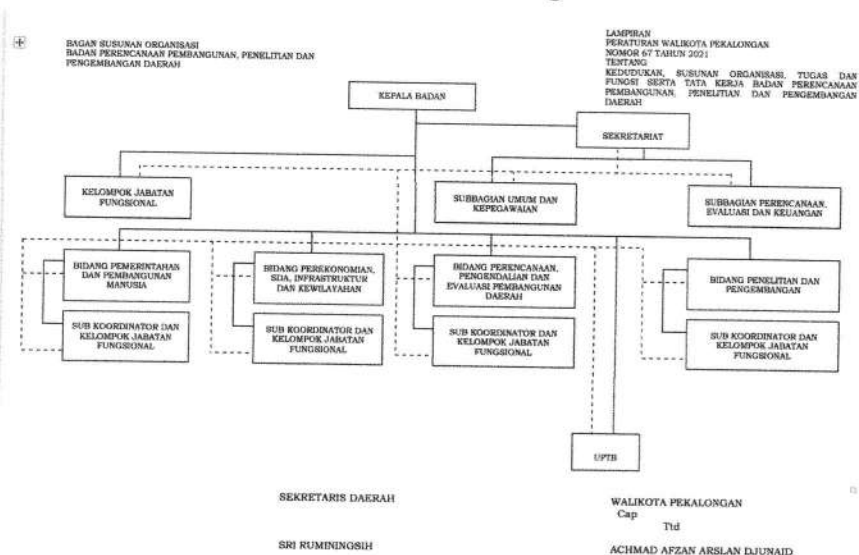
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Fungsional Perencana Ahli Madya mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rekomendasi kebijakan strategis;
2. Menyusun perencanaan kebijakan/ program strategis jangka menengah;
3. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional pada bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
4. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional bidang litbang dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan; dan
5. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Fungsional Ahli Madya
Tahun 2023

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun rekomendasi kebijakan strategis	Jumlah makalah yang tersusun	4 makalah
2	Menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah	Jumlah dokumen yang tersusun	4 dokumen
3	Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional pada bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	3 laporan
4	Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional bidang litbang dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	1 laporan
5	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	4 laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan II Tahun 2023

No.	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
1	Menyusun rekomendasi kebijakan strategis	Jumlah makalah yang tersusun	4 makalah	1	1	100
2	Menyusun perencanaan kebijakan/ program strategis jangka menengah	Jumlah dokumen yang tersusun	4 dokumen	1	1	100
3	Melakukan telaahan lingkup ectoral/regional pada bidang PPEPD, PSDAIW dan PPM dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi ublic lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	3 laporan	1	1	100
4	Melakukan telaahan lingkup ectoral/regional pada bidang Litbang dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi ublic lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	1 laporan	0	0	-
5	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Jumlah laporan yang tersusun	4 laporan	2	2	100
Rata-rata Capaian						100

Hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya adalah sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi/ sangat berhasil

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah:

1. Penyusunan rencana kegiatan telah memperhatikan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang direncanakan.
3. Ketersediaan SDM fungsional perencana sesuai dengan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Madya adalah sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi/ sangat berhasil.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada Fungsional Perencana Ahli Madya Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap target kinerja kegiatan per triwulan agar senantiasa selaras dan relevan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan mendukung dan selaras dengan Indikator kinerja Unit Kerja (Bappeda).
3. Perlu ditingkatkan indikator kinerjanya, sehingga output kegiatan dapat mendukung indicator Unit Kerja (Bappeda).

Pekalongan, 3 Juli 2023

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KOTA PEKALONGAN,



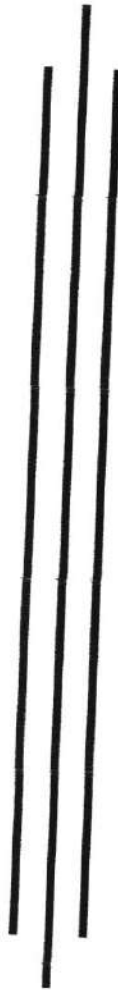
CAYEKTI WIDIGDO. AP. M.Si
NIP. 19750729 199412 1 001

FUNGSIONAL
PERENCANA AHLI MADYA,



SLAMET MIFTAKHUDIN. ST
NIP. 19781222 200501 1 003

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
EVALUASI DAN KEUANGAN



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023

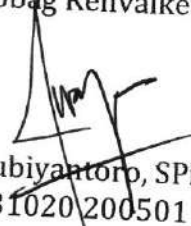
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) "Kasubbag Renvalkeu" Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa "Kasubbag Renvalkeu" mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja "Kasubbag Renvalkeu" melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

Kasubbag Renvalkeu


Wahyudi Subiyantoro, SPi.,MPA
NIP. 19731020200501 1006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan Pokok dan Fungsi Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
C Capaian Anggaran	6
BAB III PENUTUP	7
A Kesimpulan	7
B Rekomendasi	7

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kasubbag Renvalkeu Tahun 2023	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Kasubbag Renvalkeu Triwulan II Tahun 2023	5
Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023.....	6

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Jabatan Kasubbag Renvaiku	2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

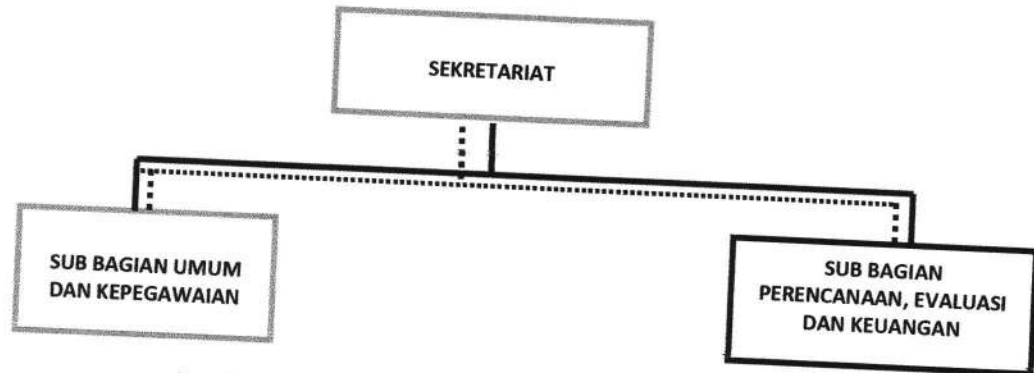
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, "Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan (Renvalkeu)" mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
2. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
3. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
4. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
5. melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
6. melaksanakan fungsi akuntansi;
7. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
8. menyusun bahan profil perangkat daerah;
9. mengelola data dan informasi;
10. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
12. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan "Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan", sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1. Struktur Jabatan Kasubbag Renvalku



Sumber : Perwal Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Perubahan “Kasubbag Renvalkeu” Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kasubbag Renvalkeu
Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	2 dokumen
2	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	2 dokumen
3	Termonevnya Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi PD	12 bulan
4	Tersusunnya dokumen SPIP	Jumlah dokumen SPIP yang disusun	5 dokumen
5	Tersusunnya dokumen SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	2 dokumen
6	Tersusunnya dokumen evaluasi renja	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen
7	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 kali
8	Tersedianya jasa administrasi	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	keuangan		
9	Tersusunnya laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja “Kasubbag Renvalkeu” Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kasubbag Renvalkeu Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kasubbag Renvalkeu
Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II	% Capaian
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	2	0	0	-
2	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan yang disusun	2	0	0	-
3	Termonevnya Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring evaluasi PD	12	6	6	100
4	Tersusunnya dokumen SPIP	Jumlah dokumen SPIP yang disusun	5	2	2	100
5	Tersusunnya dokumen SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	2	1	1	100
6	Tersusunnya dokumen evaluasi renja	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4	2	2	100
7	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	5	5	100
8	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	6	6	100
9	Tersusunnya laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1	1	1	100
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kasubbag Renvalkeu adalah sebesar 100% dengan kategori "sangat berhasil".

Adapun faktor-faktor pendukung capain kinerja antara lain:

1. Ketersediaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuan dengan perencanaan;
2. Dukungan dan Kerjasama yang baik dengan seluruh bidang di Bappeda, serta stake holder terkait.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s/d Triwulan II (Rp)	Realisasi s/d Triwulan II (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,-	1.435.000,-	715.000,-	49,83
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000,-	500.000,-	438.900,-	87,78
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,-	6.120.000,-	2.770.000,-	45,26
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.567.187.000,-	2.636.615.996,-	2.234.594.289,-	84,75
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.250.000,-	20.550.000,-	18.000.000,-	87,59
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.700.000,-	1.700.000,-	675.000,-	39,71
		4.626.137.000,-	2.666.920.996	2.257.193.189,-	84,64
Rata-rata Capaian					84,64

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan II adalah sebesar 84,64 %.

Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 84,64%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja Triwulan II sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 18,15 %.

Efisiensi tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan, secara keuangan belum dipertanggungjawabkan seluruhnya sehingga realisasi keuangan belum mencerminkan penggunaan anggaran sepenuhnya;
2. Kegiatan dilaksanakan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan realisasi anggaran sebesar 84,64%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 18,15 %.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kasubbag Renvalkeu Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Target keuangan dan target kinerja disesuaikan dengan rencana yang akan dilaksanakan pada setiap triwulan.
2. Evaluasi terhadap pagu anggaran, target kinerja dan keuangan sub kegiatan setiap triwulan agar selaras dan relevan dengan realisasi kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan berjalan.
3. Penetapan Indikator Kinerja Sub Kegiatan mendukung dan selaras dengan Indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran.

Pekalongan, 03 Julii 2023

Mengetahui
Sekretaris,



Ujianto Purwanto. SIT. MSi
NIP. 19790308 200502 1 002

Kasubbag Renvalkeu,



Wahyudi Subiyantoro. SPi. MPA
NIP. 19731020 200501 1006

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

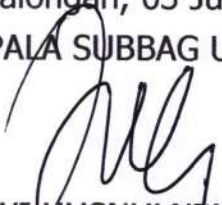
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Bappeda Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Bappeda Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2023 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


DEWI HUSNULNIATY, S.Mn.
NIP. 19721128 199803 2 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	5
C Capaian Anggaran	9
BAB III PENUTUP	11
A Kesimpulan	11
B Rekomendasi	11

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 2.1 Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian	3
TABEL 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	6
TABEL 2.3 Pengukuran Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan II Tahun 2023	6
TABEL 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023	9

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1 Struktur Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

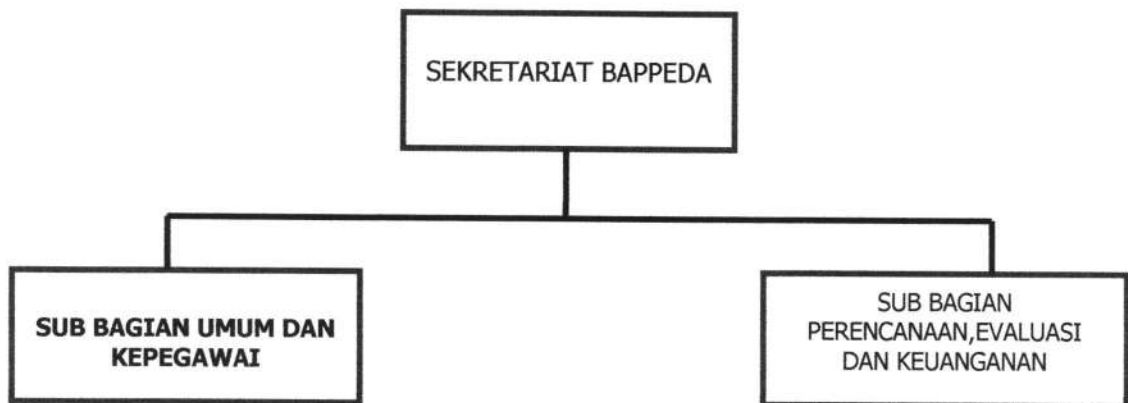
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- f. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kota Pekalongan



Sumber : Peraturan Walikota Pekalongan No. 67 tahun 2021

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Perubahan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval Batik	1 kali
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan
4	Tersedianya Peralatan dan	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 unit

	Perlengkapan Kantor	yang diadakan	
5	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarpras pendukung yang diadakan dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (bankeu)	20 unit
6	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan
7	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan
8	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
9	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
10	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	170 orang/kali
11	Terkelolanya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan
12	Terkelolanya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
13	Terkelolanya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan
14	Terkelolanya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas	12 bulan
15	Terkelolanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Triwulan II Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Acara Pekan Batik	1 kali	0	0	-
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	6 bulan	6 bulan	100
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	6 bulan	6 bulan	100

4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 unit	6 unit	6 unit	100
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarpras pendukung yang diadakan dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (bankeu)	20 unit	0	0	-
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	6 bulan	6 bulan	100
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	5 bulan	5 bulan	100
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	6 bulan	6 bulan	100
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	6 bulan	6 bulan	100
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	170 orang/kali	66 orang/kali	66 orang/kali	100
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	6 bulan	6 bulan	100
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	6 bulan	6 bulan	100

13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	6 bulan	6 bulan	100
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas	12 bulan	6 bulan	6 bulan	100
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	6 bulan	6 bulan	100
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian adalah sebesar 100 % dengan kategori sangat tinggi / sangat berhasil.

Adapun faktor-faktor pendukung capaian kinerja antara lain :

1. Ketersediaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
2. Dukungan dan kerja sama yang baik dengan seluruh bidang di Bappeda, serta stake holder terkait.

C. Kinerja Keuangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d Triwulan II (Rp)	Realisasi s.d Triwulan II (Rp)	% Capaian $\{(5)/(4)*100\}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,-	0	0	-
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.700.000,-	850.000,-	850.000,-	100
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	226.778.000,-	215.640.000,-	61.568.100,-	29
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.914.000,-	1.614.000,-	1.270.500,-	79
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.473.000,-	25.215.000,-	19.115.000,-	76
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.876.000,-	5.960.000,-	5.467.500,-	92
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,-	1.200.000,-	1.155.000,-	96
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,-	125.079.000,-	111.413.950,-	89
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.550.000,-	775.000,-	216.000,-	28

10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,-	37.500.000,-	31.792.945,-	85
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.020.000,-	47.209.000,-	41.457.512,-	88
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.592.000,-	35.598.000,-	29.935.112,-	84
13	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.200.000,-	12.100.000,-	6.355.000,-	53
	Total	826.603.000,-	361.559.450,-	310.596.619,-	
	Rata-rata Capaian				61

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan II adalah sebesar 61 % dengan kategori rendah/tidak berhasil.

Berdasarkan tabel di atas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 61 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja triwulan II sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 63,93 %.

Efisiensi tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan, secara keuangan belum dipertanggungjawabkan seluruhnya sehingga realisasi keuangan belum mencerminkan penggunaan anggaran sepenuhnya;
2. Kegiatan dilaksanakan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100 %, sedangkan realisasi anggaran sebesar 61 %. Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 63,93 %.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Target keuangan dan target kinerja disesuaikan dengan rencana yang akan dilaksanakan pada setiap triwulan;
2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap target kinerja dan keuangan kegiatan per triwulan agar selaras dan relevan dengan realisasi fisik dan keuangan pada triwulan berjalan;
3. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan mendukung dan selaras dengan Indikator kinerja program dan sasaran.

Pekalongan, 03 Juli 2023

Mengetahui
SEKRETARIS BAPPEDA



UJIAN TO PURWANTO, S.SiT ,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790308 200502 1 002

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN



DEWI HUSNULNIATY, S.Mn.
NIP. 19721128 199803 2 007

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH



BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat pada umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 3 Juli 2023

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA


YOGI HARDIANTO, S.Kom, M.Sc

Pembina

NIP. 19860315 200902 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.....	5
B. Struktur Jabatan.....	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	6
A. Perjanjian Kinerja.....	6
B. Capaian Kinerja	6
BAB III PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9
B. Rekomendasi	9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Tahun 2023	6
Tabel 2.2	Pengukuran dengan Skala Ordinal	7
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II Tahun 2023	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Pekalongan.....	5
------------	--	---

BAB I PENDAHULUAN

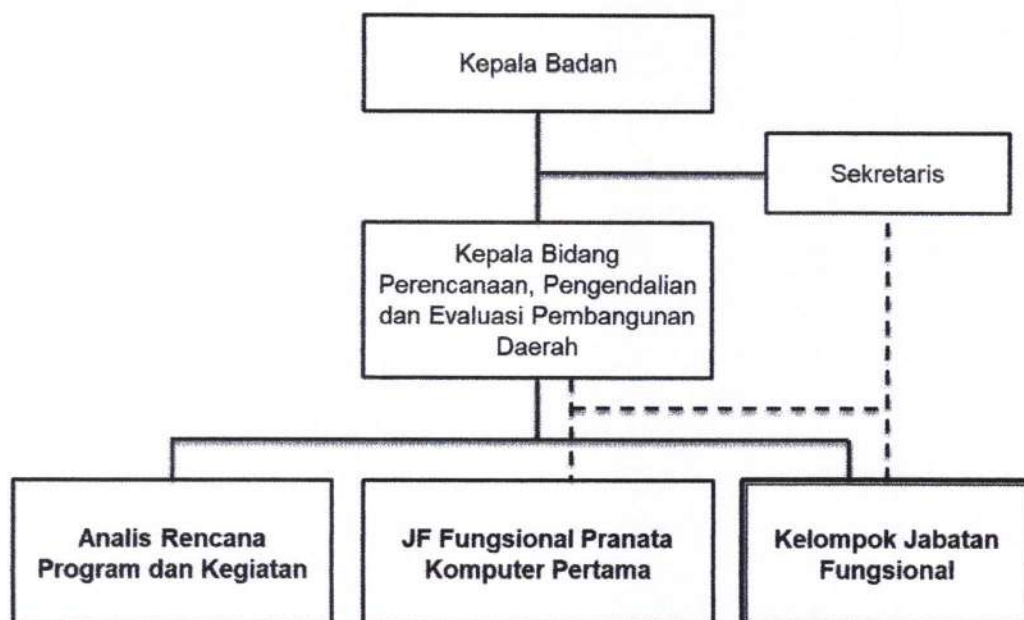
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :

1. Memformulasikan sajian untuk analisis;
2. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
5. Menguji alternatif kriteria dan model;
6. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
7. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
9. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
10. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
11. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
12. Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan sebagaimana Gambar 1.1. dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Pekalongan

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun perjanjian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Tahun 2023

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya dokumen background study RPJMD	Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun	1 dokumen
2	Tersusunnya dokumen Perubahan RKPD 2023	Jumlah dokumen perubahan RKPD 2023 yang disusun	1 dokumen
3	Tersusunnya dokumen Ranwal RKPD 2025	Jumlah dokumen Ranwal RKPD 2025 yang disusun	1 dokumen
4	Tersusunnya dokumen Ranwal RPJPD	Jumlah dokumen Ranwal RPJPD yang disusun	1 dokumen
5	Tersusunnya dokumen RKPD 2024	Jumlah dokumen RKPD 2024 yang disusun	1 dokumen
6	Tersusunnya dokumen laporan evaluasi RKPD	Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun	4 dokumen
7	Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK)	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun	4 dokumen
8	Terselenggaranya kegiatan refleksi kinerja KDH	Jumlah kegiatan refleksi kinerja KDH yang dilaksanakan	1 kali
9	Tersusunnya dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun (SIDa)	1 dokumen

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2023

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
90,1 s.d. lebih	Sangat tinggi / sangat berhasil
75,1 s.d. 90	Tinggi / berhasil
65,1 s.d. 75	Sedang / cukup berhasil
50,1 s.d. 65	Rendah / tidak berhasil
0 s.d. 50	Sangat rendah / sangat tidak berhasil

Adapun capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II Tahun 2023

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan II	Realisasi s.d. Triwulan II	% Capaian
1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-
		Jumlah dokumen perubahan RKPD 2023 yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-
		Jumlah dokumen Ranwal RKPD 2025 yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-
		Jumlah dokumen Ranwal RPJPD yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-
		Jumlah dokumen RKPD 2024 yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-
		Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan (bankeu)	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	-
		Jumlah pertemuan Asosiasi Kepala Bappeda se-Jawa Tengah yang dilaksanakan (bankeu)	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	-
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan II	Realisasi s.d. Triwulan II	% Capaian
	Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah kegiatan refleksi kinerja KDH yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	100
3	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun (SIDa)	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-
Rata-rata Capaian						100

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja pada triwulan II ini adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dijadwalkan dengan baik dan dilaksanakan sesuai jadwal, menjadi faktor keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pekerjaan.
3. Dukungan internal instansi dan kebijakan pimpinan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi / sangat berhasil.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan;
2. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian pekerjaan agar tercapai tepat waktu.

Pekalongan, 3 Juli 2023

Fungsional Perencana Ahli Muda

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kepala Bappeda,



CAYEKTI WIDIGDO, A.P, M.Si
NIP. 19750729 199412 1 001



YOGI HARBIANTO, S.Kom, M.Sc
NIP. 19860315 200902 1 001

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
PLT. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH



BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat pada umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 3 Juli 2023

Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah



YOGI HARDIANTO, S.Kom, M.Sc

Pembina

NIP. 19860315 200902 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I 5	
PENDAHULUAN	5
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	5
B. Struktur Jabatan	5
BAB II 7	
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	7
A. Perjanjian Kinerja	7
B. Capaian Kinerja	7
C. Kinerja Keuangan	8
BAB III 10	
PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10
B. Rekomendasi	10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2022	7
Tabel 2.2	Pengukuran dengan Skala Ordinal.....	8
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun 2022.....	8
Tabel 2.4	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022.....	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Pekalongan..... 6

BAB I PENDAHULUAN

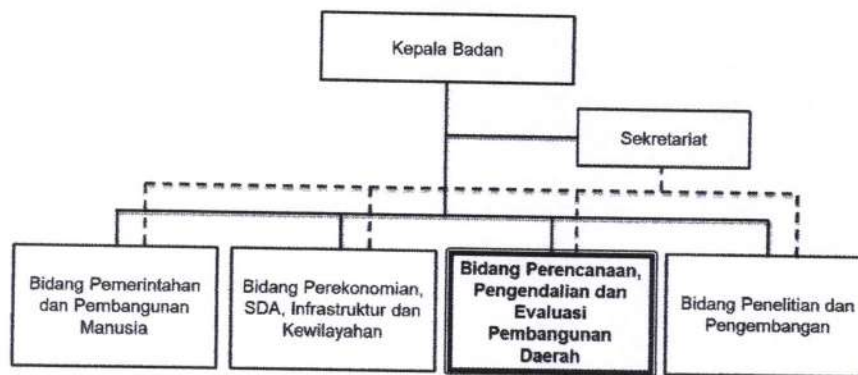
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun fungsi Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. penganalisaan dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
2. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
3. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
4. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
5. pengoordinasian dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
6. pengevaluasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
7. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
8. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
9. penyajian dan pengelolaan data informasi pembangunan daerah;
10. pengelolaan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
11. penyusunan, pelaksanaan, serta analisis evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
12. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan sebagaimana Gambar 1.1. dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Pekalongan

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun perjanjian kinerja Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2023

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen
2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen
3	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2023

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
90,1 s.d. lebih	Sangat tinggi / sangat berhasil
75,1 s.d. 90	Tinggi / berhasil
65,1 s.d. 75	Sedang / cukup berhasil
50,1 s.d. 65	Rendah / tidak berhasil
0 s.d. 50	Sangat rendah / sangat tidak berhasil

Adapun capaian kinerja Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2023

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d. Triwulan II	Realisasi s.d. Triwulan II	% Capaian
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen	0	0	-
2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen	25 persen	25 persen	100 persen
3	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen	0	0	-
Rata-rata Capaian						100 persen

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat tinggi / sangat berhasil.

C. Kinerja Keuangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023

No.	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (Rp)	Target s.d. Triwulan II (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)/(4)*100
1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	761.574.000	522.987.000	208.521.387	39,87
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	24.250.000	129.340.000	86.137.300	66,60
3	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	172.150.000	9.075.000	3.060.000	33,72
Rata-rata Capaian					46,73

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan II adalah sebesar 46,73%.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 46,73%. Maka terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 114%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atas target pagu anggaran triwulan II;
2. Memantau dan mengendalikan pengadministrasian kegiatan agar realisasi anggaran sesuai dengan target.

Pekalongan, 3 Juli 2023

Plt. Kepala Bidang PPEPD,

Mengetahui,
Kepala Bappeda


CAYEKTI WIDIGDO, A.P, M.Si
NIP. 19750729 199412 1 001


YOGI HARDIANTO, S.Kom, M.Sc
NIP. 19860315 200902 1 0016

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA**



**RR. MURNI INDAH WIJAYANTI, SKM, M.Si
NIP. 19810312 200501 2 012**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 3 Juli 2023
JF Perencana Ahli Muda



RR. MURNI INDAH WIJAYANTI, SKM, M.Si

Pembina

NIP.19810312 200501 2 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
C Kinerja Keuangan	3
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Tahun 2023.....	6
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	7
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II	7

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Pekalongan.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

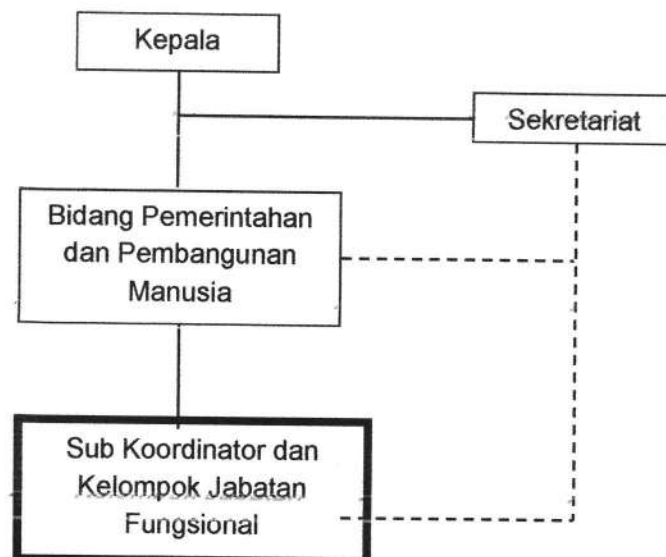
A. Tugas Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas :

1. Memformulasikan sajian untuk analisis;
2. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
5. Menguji alternatif kriteria dan model;
6. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
7. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
9. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
10. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
11. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
12. Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Pekalongan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun perjanjian kinerja Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang tepat waktu	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	1 laporan
2	Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang tepat waktu	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan	1 kali
3	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang optimal	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusun	1 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
90,1 s.d. lebih	Sangat tinggi / sangat berhasil
75,1 s.d. 90	Tinggi / berhasil
65,1 s.d. 75	Sedang / cukup berhasil
50,1 s.d. 65	Rendah / tidak berhasil
0 s.d. 50	Sangat rendah / sangat tidak berhasil

Adapun capaian kinerja Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

**Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
Triwulan II Tahun 2023**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi s.d. Triwulan II	% Capaian
1.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang tepat waktu	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	1 laporan	0	0	-
2.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang tepat waktu	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan	1 kali	0	0	-
3.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang optimal	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusu	1 dokumen	0	0	-
Rata-Rata Capaian						-

Target kinerja tahunan baru akan terealisasi pada triwulan IV Tahun 2023, sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan II belum dapat dihitung.

BAB III

PENUTUP

A. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Triwulan II belum dapat dihitung dikarenakan kinerja ditargetkan pada Triwulan IV.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dijadwalkan.
2. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian pekerjaan agar dapat diselesaikan tepat waktu.

Pekalongan, 3 Juli 2023

Mengetahui,

KABID PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BAPPEDA KOTA PEKALONGAN


Dra. INDAH BUDIARTI, M.M
NIP. 19701129 199703 2 002

JF PERENCANA AHLI MUDA



RR. MURNI INDAH WIJAYANTI, SKM. M.Si
NIP. 19810312 200501 2 0 12

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
“PENELITI AHLI PERTAMA”



**“BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH”**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) “Peneliti Ahli Pertama” Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa “Peneliti Ahli Pertama” mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja “Peneliti Ahli Pertama” melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 3 Juli 2023

“Peneliti Ahli Pertama”



“Mutiara Kartika Dewi, ST.”

Penata Tingkat I

NIP. 19780923 201101 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
BAB III PENUTUP	7
A Kesimpulan	7
B Rekomendasi	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	2
--------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pelaksana.....	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	5
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Pelaksana	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti, Peneliti Ahli Pertama mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan seleksi awal proposal Riset Unggulan Daerah (RUD)
2. Melaksanakan editor pada penerbitan jurnal litbang
3. Melaksanakan penelitian dalam Riset Bersama
4. Melaksanakan FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan
5. Melaksanakan FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan
6. Melaksanakan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)
7. melaksanakan pengukuran kapasitas Inovasi (RIDA, IDSD,IPKD)
8. Mempersiapkan keikutsertaan (IGA)
9. Melaksanakan seleksi apresiasi inovasi
10. Mempersiapkan sosialisasi (HKI)
11. Mempersiapkan penyelenggaraan pameran inovasi

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan “Peneliti Ahli Pertama”, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja “Peneliti Ahli Pertama” Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analisis Hasil Penelitian Tahun 2023

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan seleksi awal proposal Riset Unggulan Daerah (RUD)	Jumlah dokumen proposal RUD terseleksi	8 proposal RUD
2	Melaksanakan editor pada penerbitan jurnal litbang	Jumlah artikel jurnal siap terbit	6 artikel jurnal untuk 1 volume terdiri dari 2 edisi terbitan.
3	Melaksanakan penelitian dalam Riset Bersama	Jumlah dokumen Kajian Riset Bersama	2 Kajian Riset Bersama
4	Melaksanakan FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan	Jumlah FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan	3 kali
5	Melaksanakan FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	Jumlah FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	4 kali
6	Melaksanakan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)	Jumlah KTI yang disusun	1 KTI
7	melaksanakan pengukuran kapasitas Inovasi (RIDA, IDSD,IPKD)	Jumlah dokumen pengukuran	1 Dokumen

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Mempersiapkan keikutsertaan (IGA)	Jumlah dokumen pengukuran IGA	1 Dokumen
9	Melaksanakan seleksi apresiasi inovasi	Jumlah dokumen seleksi apresiasi inovasi	1 Dokumen
10	Mempersiapkan sosialisasi (HKI)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen
11	Mempersiapkan penyelenggaraan pameran inovasi	pelaksanaan pameran inovasi	1 Kali

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja “Peneliti Ahli Pertama” Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja “Peneliti Ahli Pertama” Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja “Peneliti Ahli Pertama”
Triwulan II Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
1	Melaksanakan seleksi awal proposal Riset Unggulan Daerah (RUD)	Jumlah dokumen proposal RUD terseleksi	8 proposal RUD	8	8	100%
2	Melaksanakan editor pada penerbitan jurnal litbang	Jumlah artikel jurnal siap terbit	6 artikel jurnal untuk 1 volume terdiri dari 2 edisi terbitan.	2	2	100%
3	Melaksanakan penelitian dalam Riset Bersama	Jumlah dokumen Kajian Riset Bersama	2 Kajian Riset Bersama	0	0	-
4	Melaksanakan FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan	Jumlah FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan	3 kali	2	2	100%
5	Melaksanakan FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	Jumlah FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	4 kali	0	0	-
6	Melaksanakan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)	Jumlah KTI yang disusun	1 KTI	0	0	-

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
7	melaksanakan pengukuran kapasitas Inovasi (RIDA, IDSD,IPKD)	Jumlah dokumen pengukuran	1 Dokumen	0	0	-
8	Mempersiapkan keikutsertaan (IGA)	Jumlah dokumen pengukuran IGA	1 Dokumen	1	1	100%
9	Melaksanakan seleksi apresiasi inovasi	Jumlah dokumen seleksi apresiasi inovasi	1 Dokumen	0	0	-
10	Mempersiapkan sosialisasi (HKI)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen	0	0	-
11	Mempersiapkan penyelenggaraan pameran inovasi	pelaksanaan pameran inovasi	1 Kali	0	0	-
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa rata-rata capaian 100% dengan kategori “sangat berhasil”, adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target diantaranya :

1. Adanya kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait (Perguruan Tinggi dan OPD), terutama dalam pemenuhan dokumen/data yang dibutuhkan untuk Kota Pekalongan;
2. Pelaksanaan tugas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga memungkinkan penyelesaian tugas secara optimal;
3. Selalu meng-*update* peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja agar sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja “Peneliti Ahli Pertama” adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam “Peneliti Ahli Pertama” Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap target kinerja per triwulan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai.
2. Penetapan indikator kinerja individu yang mengacu pada indikator kinerja organisasi

Pekalongan, 3 Juli 2023

Mengetahui

KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


SEVINA MAHARDINI, ST., MT., M.Sc
NIP. 19820925 200604 2 009

PENELITI AHLI PERTAMA


MUTIARA KARTIKA DEWI, ST
NIP. 19780923 201101 2 001

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan I Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

Fungsional Perencana Ahli Muda



HERLAMBANG DWI A. SE, MAP

Penata

NIP. 19850326 200902 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

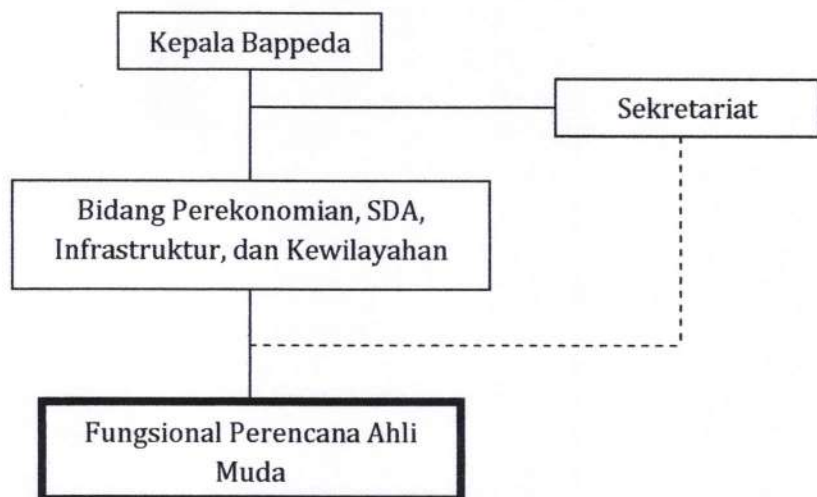
A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Memformulasikan sajian untuk analisis;
2. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
5. Menguji alternatif kriteria dan model;
6. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
7. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
9. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
10. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
11. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
12. Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda
Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Review Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang transparan dan akuntabel	1 dokumen
2	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan koordinasi bidang kewilayahan yang transparan dan akuntabel	1 dokumen
3	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan koordinasi bidang perekonomian yang transparan dan akuntabel	1 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan I Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda

Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
1	Terwujudnya koordinasi	Jumlah dokumen Review Strategi	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
	pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Sanitasi Kota (SSK) yang transparan dan akuntabel				
2	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan koordinasi bidang kewilayahan yang transparan dan akuntabel	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-
3	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan koordinasi bidang perekonomian yang transparan dan akuntabel	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-
Rata-rata Capaian						-

Target kinerja tahunan akan terealisasi pada triwulan IV Tahun 2023 sehingga capaian kinerja pada Triwulan II belum dapat dihitung. Meskipun target kinerja belum dapat dihitung namun dalam rangka pencapaian target kinerja tahunan sudah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, penyusunan KAK.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja pada Triwulan II sebesar 0 (nol) dokumen sedangkan realisasinya sebesar 0 (nol) dokumen sehingga capaian kinerja tidak dapat dihitung.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap target kinerja kegiatan per triwulan agar senantiasa selaras dan relevan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan mendukung dan selaras dengan Indikator kinerja Unit Kerja (Bappeda).
3. Perlu ditingkatkan indikator kinerjanya, sehingga output kegiatan dapat mendukung indikator Unit Kerja (Bappeda).

Pekalongan, 03 Juli 2023

Mengetahui

Kabid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur,
dan Kewilayahan,



IMRON ROSYIDI, S.Pi., M. App., Sc.
NIP. 19780529 200212 1 003

Fungsional Perencana Ahli Muda,



HERLAMBAW DWIA, SE. MAP
NIP. 19850326 200902 1 002

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**
TAHUN 2023

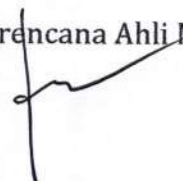
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda melalui pelaksanaan tugas dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

Fungsional Perencana Ahli Muda



DIAH WAHYUNINGRUM, ST

Penata

NIP. 19841117 201502 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Memformulasikan sajian untuk analisis;
2. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
5. Menguji alternatif kriteria dan model;
6. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
7. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
9. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
10. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
11. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
12. Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda
Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen kajian pasca kegiatan penanganan banjir dan rob Kali Loji dan Kali Banger yang transparan dan akuntabel	1 dokumen
2	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan koordinasi bidang infrastruktur yang transparan dan akuntabel	1 dokumen
3	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen kajian FS akses ke Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Petanglong yang transparan dan akuntabel	1 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Fungsional Perencana Ahli Muda
Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen kajian pasca kegiatan penanganan banjir dan rob Kali Loji dan Kali Banger yang transparan dan akuntabel	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-
2	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan koordinasi bidang infrastruktur yang transparan dan akuntabel	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-
3	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen kajian FS akses ke Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Petanglong yang transparan dan akuntabel	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-
Rata-rata Capaian						-

Target kinerja tahunan akan terealisasi pada triwulan IV Tahun 2023 sehingga capaian kinerja pada Triwulan II belum dapat dihitung. Meskipun target kinerja belum dapat dihitung namun dalam rangka pencapaian target kinerja tahunan sudah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi, konsultasi, penyusunan KAK.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja pada Triwulan II sebesar 0 (nol) dokumen sedangkan realisasinya sebesar Rp. 17.990.000,- (Tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dokumen sehingga capaian kinerja tidak dapat dihitung.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Fungsional Perencana Ahli Muda Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap target kinerja kegiatan per triwulan agar senantiasa selaras dan relevan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan mendukung dan selaras dengan Indikator kinerja Unit Kerja (Bappeda).
3. Perlu ditingkatkan indikator kinerjanya, sehingga output kegiatan dapat mendukung indikator Unit Kerja (Bappeda).

Pekalongan, 03 Juli 2023

Mengetahui

Kabid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur,
dan Kewilayahan,

Fungsional Perencana Ahli Muda,


IMRON ROSYIDI, S.Pi., M. App., Sc.
NIP. 19780529 200212 1 003


DIAH WAHYUNINGRUM, ST
NIP. 19841117 201502 2 003

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
“PENELITI AHLI PERTAMA”



**“BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH”**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) "Peneliti Ahli Pertama" Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa "Peneliti Ahli Pertama" mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja "Peneliti Ahli Pertama" melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 3 Juli 2023

"Peneliti Ahli Pertama"



"Amalia Ida Gunawati, ST."

Penata Tingkat I

NIP. 19860113 201502 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
BAB III PENUTUP	7
A Kesimpulan	7
B Rekomendasi	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	2
--------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pelaksana.....	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	5
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Pelaksana	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti, Peneliti Ahli Pertama mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan seleksi awal proposal Riset Unggulan Daerah (RUD)
2. Melaksanakan editor pada penerbitan jurnal litbang
3. Melaksanakan penelitian dalam Riset Bersama
4. Melaksanakan FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan
5. Melaksanakan FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan
6. Melaksanakan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)
7. melaksanakan pengukuran kapasitas Inovasi (RIDA, IDSD,IPKD)
8. Mempersiapkan keikutsertaan (IGA)
9. Melaksanakan seleksi apresiasi inovasi
10. Mempersiapkan sosialisasi (HKI)
11. Mempersiapkan penyelenggaraan pameran inovasi

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan “Peneliti Ahli Pertama”, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja “Peneliti Ahli Pertama” Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analisis Hasil Penelitian Tahun 2023

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan seleksi awal proposal Riset Unggulan Daerah (RUD)	Jumlah dokumen proposal RUD terseleksi	8 proposal RUD
2	Melaksanakan editor pada penerbitan jurnal litbang	Jumlah artikel jurnal siap terbit	6 artikel jurnal untuk 1 volume terdiri dari 2 edisi terbitan.
3	Melaksanakan penelitian dalam Riset Bersama	Jumlah dokumen Kajian Riset Bersama	2 Kajian Riset Bersama
4	Melaksanakan FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan	Jumlah FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan	3 kali
5	Melaksanakan FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	Jumlah FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	4 kali
6	Melaksanakan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)	Jumlah KTI yang disusun	1 KTI
7	melaksanakan pengukuran kapasitas Inovasi (RIDA, IDSD,IPKD)	Jumlah dokumen pengukuran	1 Dokumen

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Mempersiapkan keikutsertaan (IGA)	Jumlah dokumen pengukuran IGA	1 Dokumen
9	Melaksanakan seleksi apresiasi inovasi	Jumlah dokumen seleksi apresiasi inovasi	1 Dokumen
10	Mempersiapkan sosialisasi (HKI)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen
11	Mempersiapkan penyelenggaraan pameran inovasi	pelaksanaan pameran inovasi	1 Kali

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja “Peneliti Ahli Pertama” Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja “Peneliti Ahli Pertama” Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja “Peneliti Ahli Pertama”
Triwulan II Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
1	Melaksanakan seleksi awal proposal Riset Unggulan Daerah (RUD)	Jumlah dokumen proposal RUD terseleksi	8 proposal RUD	8	8	100%
2	Melaksanakan editor pada penerbitan jurnal litbang	Jumlah artikel jurnal siap terbit	6 artikel jurnal untuk 1 volume terdiri dari 2 edisi terbitan.	2	2	100%
3	Melaksanakan penelitian dalam Riset Bersama	Jumlah dokumen Kajian Riset Bersama	2 Kajian Riset Bersama	0	0	-
4	Melaksanakan FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan	Jumlah FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan	3 kali	2	2	100%
5	Melaksanakan FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	Jumlah FGD Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	4 kali	0	0	-
6	Melaksanakan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)	Jumlah KTI yang disusun	1 KTI	0	0	-

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
7	melaksanakan pengukuran kapasitas Inovasi (RIDA, IDSD,IPKD)	Jumlah dokumen pengukuran	1 Dokumen	0	0	-
8	Mempersiapkan keikutsertaan (IGA)	Jumlah dokumen pengukuran IGA	1 Dokumen	1	1	100%
9	Melaksanakan seleksi apresiasi inovasi	Jumlah dokumen seleksi apresiasi inovasi	1 Dokumen	0	0	-
10	Mempersiapkan sosialisasi (HKI)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen	0	0	-
11	Mempersiapkan penyelenggaraan pameran inovasi	pelaksanaan pameran inovasi	1 Kali	0	0	-
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa rata-rata capaian 100% dengan kategori “sangat berhasil”, adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target diantaranya :

1. Adanya kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait (Perguruan Tinggi dan OPD), terutama dalam pemenuhan dokumen/data yang dibutuhkan untuk Kota Pekalongan;
2. Pelaksanaan tugas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga memungkinkan penyelesaian tugas secara optimal;
3. Selalu meng-*update* peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja agar sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja “Peneliti Ahli Pertama” adalah sebesar 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”

B. Rekomendasi

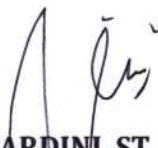
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam “Peneliti Ahli Pertama” Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap target kinerja per triwulan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai.
2. Penetapan indikator kinerja individu yang mengacu pada indikator kinerja organisasi

Pekalongan, 3 Juli 2023

Mengetahui

KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



SEVINA MAHARDINI, ST., MT., M.Sc
NIP. 19820925 200604 2 009

PENELITI AHLI PERTAMA



AMALIA IDA GUNAWATI, ST
NIP. 19860113 201502 2 001

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
ANALIS PERENCANAAN



BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Selain itu, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 3 Juli 2023
Analis Perencanaan



Ginayas Farida, S. Si
Penata Muda (III/b)
NIP. 19870223 201903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
BAB III PENUTUP	6
A Kesimpulan	7
B Rekomendasi	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	2
-------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Analisis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Tahun 2023	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Analisis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan II Tahun 2023	5

BAB I

PENDAHULUAN

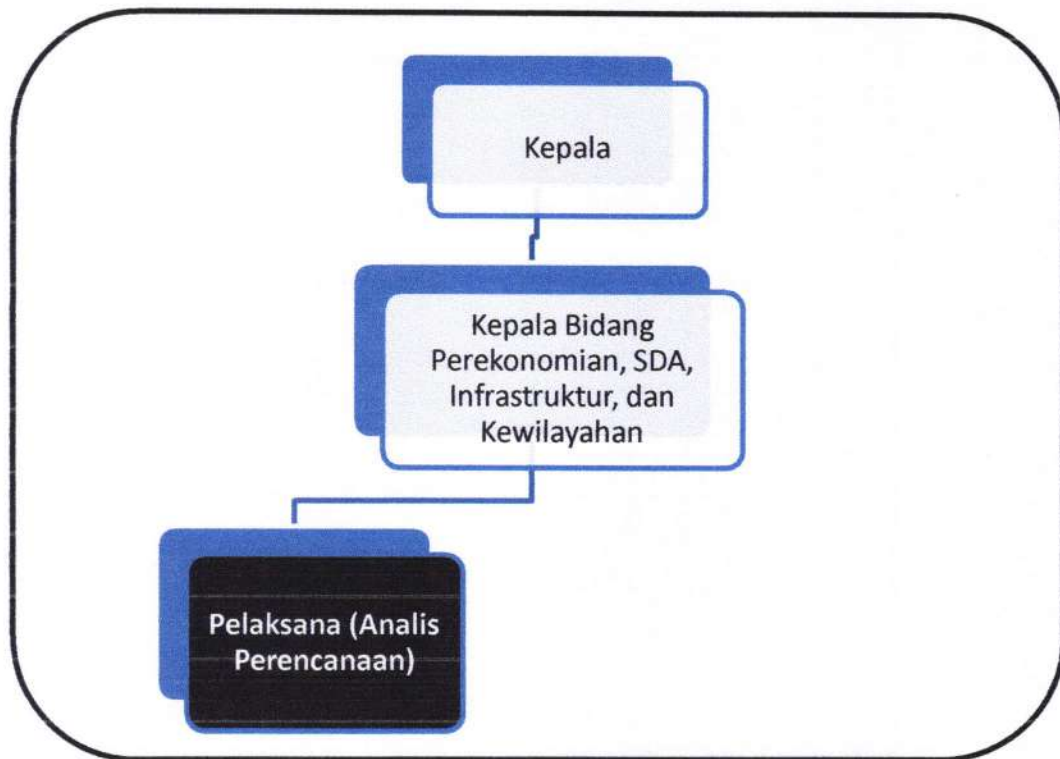
A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.C Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Analisis Perencanaan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan-bahan kerja, meliputi data Rencana Kerja, data Rencana Pembangunan OPD teknis terkait urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, perekonomian, hasil Musyawarah Rencana Pembangunan urusan ekonomi, yang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan meliputi data Rencana Kerja, data Rencana Pembangunan OPD teknis terkait urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, perekonomian, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan urusan ekonomi sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kajian perencanaan urusan ekonomi berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
5. Menyusun saran/rekomendasi perencanaan urusan ekonomi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Analisis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan sebagaimana gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Analis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Analis Perencanaan pada Bidang Perekonomian SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun bahan-bahan kerja, meliputi data Rencana Kerja, data Rencana Pembangunan OPD teknis terkait urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, perekonomian, hasil Musyawarah Rencana Pembangunan urusan ekonomi, yang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Bahan-bahan kerja meliputi data Rencana Kerja, data Rencana Pembangunan OPD teknis terkait urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, perekonomian, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan urusan ekonomi	8 dokumen
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan meliputi data Rencana Kerja, data Rencana Pembangunan OPD teknis terkait urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, perekonomian, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan urusan ekonomi sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Hasil analisa dan hasil telaahan bahan-bahan kerja yang meliputi Rencana Kerja dan rencana pembangunan OPD teknis urusan ekonomi	10 dokumen
3	Melaksanakan kajian perencanaan urusan ekonomi berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Hasil kajian berdasarkan permasalahan urusan ekonomi	12 dokumen
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Laporan berdasarkan hasil kerja	24 dokumen

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
5	Menyusun saran/rekomendasi perencanaan urusan ekonomi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Saran/draft rekomendasi urusan ekonomi	8 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Analis Perencanaan pada Bidang Perekonomian SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan III Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Analis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3.

Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Analis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Wilayah Triwulan II Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II	% Capaian
1	Menyusun bahan-bahan kerja, meliputi data Rencana Kerja, data Rencana Pembangunan OPD teknis terkait urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, perekonomian, hasil Musyawarah Rencana Pembangunan urusan ekonomi, yang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Bahan-bahan kerja meliputi data Rencana Kerja, data Rencana Pembangunan OPD teknis terkait urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, perekonomian, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan urusan ekonomi	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan meliputi data Rencana Kerja, data Rencana Pembangunan OPD teknis terkait urusan pertanian, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan, perekonomian, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan urusan ekonomi sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Hasil analisa dan hasil telaahan bahan-bahan kerja yang meliputi Rencana Kerja dan rencana pembangunan OPD teknis urusan ekonomi	10 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%
3	Melaksanakan kajian perencanaan urusan ekonomi berdasarkan	Hasil kajian berdasarkan permasalahan urusan ekonomi	12 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II	% Capaian
	permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan					
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Laporan berdasarkan hasil kerja	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%
5	Menyusun saran/rekomendasi perencanaan urusan ekonomi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Saran/draft rekomendasi urusan ekonomi	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Rata-rata Capaian					100%

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Analis Perencanaan pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil".

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Analis Perencanaan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar target indikator kinerja ke depan tetap dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan tetap tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan.

Mengetahui,
Kabid PSDA, Infrastruktur dan Kewilayahan


Imron Rosyidi, S. Pi, M. App. Sc.
NIP. 19780529 200212 1 003

Pekalongan, 3 Juli 2023

Analis Perencanaan,


Ginayas Farida, S.Si
NIP. 19870223 201903 2 003

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
"ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN"



**"BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH"**
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) "Analisis Rencana Program dan Kegiatan" Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa "Analisis Rencana Program dan Kegiatan" mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja "Analisis Rencana Program dan Kegiatan" melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

"Analisis Rencana Program dan Kegiatan"



"Aulia Nailufar, SE"

Penata Muda Tk. I

NIP. 19861001 201903 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	6
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No. 86 Tahun 2022 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, “Analisis Rencana Program dan Kegiatan” mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan-bahan kerja meliputi data rencana kerja dari OPD teknis, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, data teknis OPD, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan meliputi data rencana kerja dari OPD teknis, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, data teknis OPD, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas,
3. Melaksanakan kajian perencanaan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
5. Menyusun saran/rekomendasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan “Analisis Rencana Program dan Kegiatan”, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja “Analisis Rencana Program dan Kegiatan” Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analisis Rencana Program dan Kegiatan
Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyusun bahan-bahan kerja meliputi data rencana kerja dari OPD teknis, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, data teknis OPD, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah bahan laporan yang tersusun	14 dokumen
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan meliputi data rencana kerja dari OPD teknis, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, data teknis OPD, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah bahan laporan yang tersedia	14 dokumen
3	Melaksanakan kajian perencanaan	Jumlah bahan laporan yang tersusun dan tersedia	14 kegiatan

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
	pembangunan daerah berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan		
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah bahan laporan yang tersusun dan tersedia	14 dokumen
5	Menyusun saran/rekomendasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah bahan laporan yang tersusun dan tersedia	1 file/berkas

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja “Analisis Rencana Program dan Kegiatan” Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja “Analisis Rencana Program dan Kegiatan” Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja “Analisis Rencana Program dan Kegiatan”
Triwulan I Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
1	Menyusun bahan-bahan kerja meliputi data rencana kerja dari OPD teknis, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, data teknis OPD, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah bahan laporan yang tersusun	14 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan meliputi data rencana kerja dari OPD teknis, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, data teknis OPD, data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar	Jumlah bahan laporan yang tersedia	14 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
	memperlancar pelaksanaan tugas					
3	Melaksanakan kajian perencanaan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah bahan laporan yang tersusun dan tersedia	14 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah bahan laporan yang tersusun dan tersedia	14 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%
5	Menyusun saran/rekomendasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah bahan laporan yang tersusun dan tersedia	1 file/berkas	0 file/berkas	0 file/berkas	-
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa seluruh target telah tercapai 100% dengan kategori "sangat berhasil", adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target diantaranya :

1. Adanya Kerjasama yang baik dengan bidang -bidang terkait, terutama dalam pemenuhan dokumen/data OPD yang dibutuhkan untuk Kota Pekalongan;
2. Pelaksanaan tugas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sehingga memungkinkan penyelesaian tugas secara optimal;
3. Selalu meng-update peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja agar sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja "Analisis Rencana Program dan Kegiatan" adalah sebesar 100% dengan kategori "sangat berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam "Analisis Rencana Program dan Kegiatan" Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan bisa tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

Mengetahui

ATASAN LANGSUNG
Plt. Kabid PPEPD,

"Analisis Rencana Program dan Kegiatan",


"Yogi Hardianto, S.Kom, M.Sc"
NIP. 19860315 200902 1 001


"Aulia Nailufar, SE"
NIP. 19861001 201903 2 001

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI UMUM
Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 03 Juli 2023
Pengadministrasi Umum



Nor Romadhon

NIP. 19780822 200701 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Tugas Jabatan.....	1
B Struktur Jabatan.....	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	3
A Perjanjian Kinerja.....	3
B Capaian Kinerja.....	4
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan.....	5
B Rekomendasi.....	5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2023	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan II Tahun 2023	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	2
--------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan, Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - Menyiapkan bahan
 - Mempersiapkan alat kerja
 - Melaksanakan 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)
 - Membuat laporan
2. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - Menyiapkan bahan
 - Mempersiapkan alat kerja
 - Melaksanakan arahan pimpinan
 - Membuat laporan
3. Membersihkan peralatan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali;
 - Menyiapkan bahan
 - Mempersiapkan alat kerja
 - Melaksanakan pemeliharaan/perawatan/pembersihan prasarana dan sarana
 - Membuat laporan
4. Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak;
 - Menyiapkan bahan
 - Mempersiapkan alat kerja

- Melaksanakan pemeliharaan /perawatan /pembersihan prasarana dan sarana
 - Melakukan pemeliharaan objek kerja
 - Membuat laporan
5. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas.
- Menyiapkan bahan
 - Membuat Laporan

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Kegiatan	12
2	Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Kegiatan	12
3	Membersihkan peralatan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	Kegiatan	12
4	Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak	Kegiatan	12
5	Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas	Laporan	12

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal seperti pada table 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

SkalaOrdinal	Predikat/Kategori
90.1s.d. lebih	Sangat Tinggi/Sangat Berhasil
75.1s.d. 90	Tinggi/Berhasil
65.1s.d.75	Sedang/Cukup Berhasil
50.1s.d. 65	Rendah/Tidak Berhasil
0s.d. 50	Sangat Rendah/ Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan II Tahun 2022 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Umum pada
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Triwulan I Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
1	Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Kegiatan	12	6	6	100
2	Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Kegiatan	12	6	6	100
3	Membersihkan peralatan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	Kegiatan	12	6	6	100
4	Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak	Kegiatan	12	6	6	100
5	Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas	Laporan	12	6	6	100
Rata-rata Capaian						100

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil"

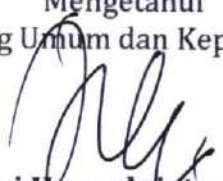
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan bisa tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan

Pekalongan, 03 Juli 2022

Mengetahui
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,


Dewi Husnulniaty. S.Mn
NIP.19721128 199803 2 007

Pelaksana ,


Nor Romadhon
NIP. 19780822 20070 1 008

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan



BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengelola Program dan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengelola Program dan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengelola Program dan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

Pengelola Program dan Kegiatan



Makhmudah, A.Md

Penata Muda (III/a)

NIP. 19840809 201502 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	4
BAB III PENUTUP	8
A Kesimpulan	8
B Rekomendasi	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	2
-------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Tahun 2023	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	5
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Triwulan II Tahun 2023	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

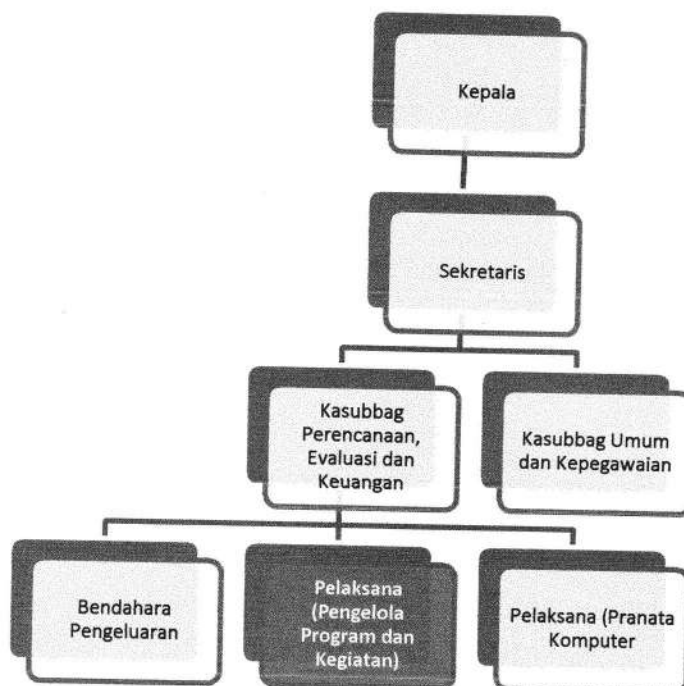
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pengelola Program dan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan bidang pengelola program dan kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau data program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Melaksanakan dan mengelola program kerja bidang pengelola program dan kegiatan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Melaksanakan pengkoordinasian dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang program dan kegiatan, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Menyusun dan menyiapkan evaluasi pelaporan bidang program dan kegiatan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengelola Program dan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengelola Program dan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan pada
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menginput Renja pada aplikasi perencanaan dan penganggaran	Jumlah Renja yang diinput	3 kali
2	Mengadministrasi pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan draft Renja	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan dan draft Renja	2 laporan
3	Menginput RKA pada aplikasi perencanaan dan penganggaran	Jumlah RKA yang diinput	2 kali
4	Mengadministrasi pertanggungjawaban keuangan dan menyusun draft RKA dan DPA	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan dan bahan penyusunan RKA dan DPA	1 laporan
5	Mempersiapkan rapat-rapat penyusunan SAKIP	Jumlah notulen hasil rapat yang dihasilkan	2 laporan
6	Menyusun draft SAKIP dan menggandakan dokumen-dokumen SAKIP Bappeda	Jumlah bahan penyusunan SAKIP	2 dokumen
7	Menyiapkan rapat evaluasi Renja Bappeda	Jumlah notulen hasil rapat yang dihasilkan	4 laporan
8	Mendata dan merekap capaian kinerja triwulanan Bappeda serta melaksanakan desk evaluasi Renja triwulanan	Jumlah pelaksanaan desk evaluasi Renja	4 kali
9	Mempersiapkan rapat pelaksanaan dan evaluasi	Jumlah notulen hasil rapat yang dihasilkan	2 laporan

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
	penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)		
10	Menyusun draft Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan laporan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Jumlah bahan penyusunan RTP dan laporan pemantauan RTP	5 dokumen
11	Mengadministrasi pertanggungjawaban keuangan evaluasi Bappeda	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	1 laporan
12	Menginventarisir dan mengumpulkan data dan informasi perencanaan dan evaluasi Bappeda	Jumlah laporan inventarisasi data dan informasi perencanaan dan evaluasi Bappeda	1 laporan
13	Mengadministrasi gaji dan tunjangan pegawai ASN Bappeda	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	1 laporan
14	Mengadministrasi pengelolaan penatausahaan keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	1 laporan
15	Menginput pertanggungjawaban keuangan pada aplikasi perencanaan penganggaran	Jumlah pertanggungjawaban keuangan yang diinput	48 kali
16	Mengadministrasi penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	1 laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengelola Program dan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pengelola Program dan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Triwulan I Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan pada
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Triwulan II Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II	% Capaian
1	Menginput Renja pada aplikasi perencanaan dan penganggaran	Jumlah Renja yang diinput	3 kali	1 kali	1 kali	100
2	Mengadministrasi pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan draft Renja	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan dan draft Renja	2 laporan	0 laporan	0 laporan	-
3	Menginput RKA pada aplikasi perencanaan dan penganggaran	Jumlah RKA yang diinput	2 kali	0 kali	0 kali	-
4	Mengadministrasi pertanggungjawaban keuangan dan menyusun draft RKA dan DPA	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan dan bahan penyusunan RKA dan DPA	1 laporan	0 laporan	0 laporan	-
5	Mempersiapkan rapat-rapat penyusunan SAKIP	Jumlah notulen hasil rapat yang dihasilkan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100
6	Menyusun draft SAKIP dan menggandakan dokumen-dokumen SAKIP Bappeda	Jumlah bahan penyusunan SAKIP	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
7	Menyiapkan rapat evaluasi Renja Bappeda	Jumlah notulen hasil rapat yang dihasilkan	4 laporan	2 laporan	2 laporan	100
8	Mendata dan merekap	Jumlah pelaksanaan	4 kali	2 kali	2 kali	100

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II	% Capaian
	capaian kinerja triwulanan Bappeda serta melaksanakan desk evauasi Renja triwulanan	desk evaluasi Renja				
9	Mempersiapkan rapat pelaksanaan dan evaluasi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Jumlah notulen hasil rapat yang dihasilkan	2 laporan	0 laporan	0 laporan	-
10	Menyusun draft Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan laporan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Jumlah bahan penyusunan RTP dan laporan pemantauan RTP	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100
11	Mengadministrasi pertanggungjawaban keuangan evaluasi Bappeda	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	1 laporan	0 laporan	0 laporan	-
12	Menginventarisir dan mengumpulkan data dan informasi perencanaan dan evaluasi Bappeda	Jumlah laporan inventarisasi data dan informasi perencanaan dan evaluasi Bappeda	1 laporan	0 laporan	0 laporan	-
13	Mengadministrasi gaji dan tunjangan pegawai ASN Bappeda	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	1 laporan	0 laporan	0 laporan	-
14	Mengadministrasi pengelolaan penatausahaan keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	1 laporan	0 laporan	0 laporan	-
15	Menginput pertanggungjawaban keuangan pada aplikasi perencanaan penganggaran	Jumlah pertanggungjawaban keuangan yang diinput	48 kali	24 kali	24 kali	100
16	Mengadministrasi penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	1 laporan	0 laporan	0 laporan	-
Rata-rata Capaian						100

Dari table diatas bisa disimpulkan bahwa seluruh target telah tercapai 100% dengan kategori "sangat berhasil", adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target diantaranya :

1. Adanya kerjasama yang baik dengan bidang-bidang terkait, terutama dalam pemenuhan dokumen / data OPD yang dibutuhkan untuk Kota Pekalongan;

2. Pelaksanaan tugas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga memungkinkan penyelesaian tugas secara optimal;
3. Selalu meng-*update* peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja agar sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengelola Program dan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan adalah sebesar 100% dengan kategori "Sangat Berhasil"

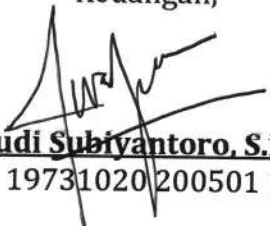
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengelola Program dan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan bisa tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan

Pekalongan, 03 Juli 2023

Mengetahui
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan
Keuangan,


Wahyudi Subiyantoro, S.Pi.,MPA
NIP. 19731020200501 1 006

Pengelola Program dan Kegiatan,


Makhmudah, A.Md
NIP. 19840809 201502 2 002

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
JF PRANATA KOMPUTER PERTAMA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN**
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pranata Komputer Pertama Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa JF Pranata Komputer Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja JF Pranata Komputer Pertama melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

JF Pranata Komputer Pertama



Angga Sultoni, S.Kom

Penata Muda

NIP. 19891104 202012 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

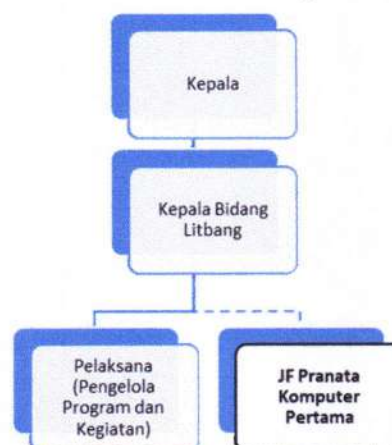
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, JF Pranata Komputer Pertama mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan program aplikasi sistem informasi
2. Melakukan Backup Atau Pemulihan Data
3. Melakukan Pemeliharaan Infrastruktur TI
4. Melakukan Pemasangan Infrastruktur TI
5. Melakukan Deteksi Dan Atau Perbaikan Terhadap Permasalahan Infrastruktur TI
6. Menyiapkan Peralatan Video Conference (Vicon/Streaming), Monitoring Peralatan (Audio, Video, Dan Perangkat Jaringan), Dan Mengatur Layout
7. Melakukan validasi kebutuhan informasi
8. Melakukan Manipulasi data
9. Melakukan deteksi dan atau perbaikan kerusakan sistem informasi
10. Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi
11. Mengelola pengguna dan hak akses data

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan JF Pranata Komputer Pertama, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja JF Pranata Komputer Pertama
Tahun 2023

No.	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Riset Unggulan Daerah (RUD)	Jumlah kebutuhan informasi yang disediakan	5 dokumen
2	Memfasilitasi video conference Pelaksanaan Kegiatan Riset Unggulan Daerah (RUD)	Jumlah dokumen/laporan video conference RUD	3 dokumen
3	Melaksanakan pengelolaan pengguna dan hak akses data pada website jurnal	jumlah dokumen user baru yang dikelola pada aplikasi website jurnal	2 dokumen
4	Melaksanakan backup atau pemulihan data pada website jurnal secara rutin	Jumlah dokumen/file hasil backup dan pemulihan data	12 dokumen
5	Mengelola Aplikasi Website Kelitbangan secara Optimal	Jumlah dokumen permohonan Surat Keterangan Penelitian yang diverifikasi dan atau validasi	300 dokumen
6	Mengelola Aplikasi Website Jurnal secara Optimal	Jumlah dokumen artikel yang diterbitkan pada aplikasi website jurnal	10 dokumen
7	Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Kegiatan Kajian Riset Bersama, FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan/Pengabdian Masyarakat	Jumlah kebutuhan informasi yang disediakan	10 dokumen

8	Memfasilitasi video conference pelaksanaan kegiatan Kajian Riset Bersama, FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan/Pengabdian Masyarakat	Jumlah dokumen/laporan video conference kegiatan Kajian Riset Bersama, FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan/Pengabdian Masyarakat	3 dokumen
9	Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Kegiatan Inovasi, Krenova, Pelaksanaan RIDA, IDSD,IPKD dan terlaksananya sosialisasi HKI	Jumlah dokumen kebutuhan informasi yang disediakan	3 dokumen
10	Menyediakan Editing Obyek Multimedia Kompleks Dengan Piranti Lunak dalam proses pelaksanaan kegiatan Inovasi, Krenova, Pelaksanaan RIDA, IDSD,IPKD dan terlaksananya sosialisasi HKI	Jumlah dokumen Obyek Multimedia yang disediakan	1 dokumen
11	Memfasilitasi video conference Pelaksanaan Kegiatan Inovasi, Krenova, Pelaksanaan RIDA, IDSD,IPKD dan terlaksananya sosialisasi HKI	Jumlah dokumen/laporan video conference Kegiatan Inovasi, Krenova, Pelaksanaan RIDA, IDSD,IPKD dan terlaksananya sosialisasi HKI	3 dok/laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin, tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja JF Pranata Komputer Pertama
Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II	% Capaian
1	Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Riset Unggulan Daerah (RUD)	Jumlah kebutuhan informasi yang disediakan	5 dokumen	3	3	100%
2	Memfasilitasi video conference Pelaksanaan Kegiatan Riset Unggulan Daerah (RUD)	Jumlah dokumen/laporan video conference RUD	3 dokumen	1	1	100%
3	Melaksanakan pengelolaan pengguna dan hak akses data pada website jurnal	jumlah dokumen user baru yang dikelola pada aplikasi website jurnal	2 dokumen	2	2	100%
4	Melaksanakan backup atau pemulihan data pada website jurnal secara rutin	Jumlah dokumen/file hasil backup dan pemulihan data	12 dokumen	6	6	100%
5	Mengelola Aplikasi Website Kelitbangan secara Optimal	Jumlah dokumen permohonan Surat Keterangan Penelitian yang diverifikasi danatau validasi	300 dokumen	250	250	100%
6	Mengelola Aplikasi Website Jurnal secara Optimal	Jumlah dokumen artikel yang diterbitkan pada aplikasi website jurnal	10 dokumen	1	1	100%
7	Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Kegiatan Kajian Riset Bersama, FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan/Pengabdian Masyarakat	Jumlah kebutuhan informasi yang disediakan	10 dokumen	7	4	57,1%
8	Memfasilitasi video conference pelaksanaan kegiatan	Jumlah dokumen/laporan video conference	3 dokumen	1	1	100%

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II	% Capaian
	Kajian Riset Bersama, FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan/Pengabdian Masyarakat	kegiatan Kajian Riset Bersama, FGD/Workshop/Rakor Kelitbangan/Pengabdian Masyarakat				
9	Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Kegiatan Inovasi, Krenova, Pelaksanaan RIDA, IDSD,IPKD dan terlaksananya sosialisasi HKI	Jumlah dokumen kebutuhan informasi yang disediakan	3 dokumen	1	1	100%
10	Menyediakan Editing Obyek Multimedia Kompleks Dengan Piranti Lunak dalam proses pelaksanaan kegiatan Inovasi, Krenova, Pelaksanaan RIDA, IDSD,IPKD dan terlaksananya sosialisasi HKI	Jumlah dokumen Obyek Multimedia yang disediakan	1 dokumen	1	1	100%
11	Memfasilitasi video conference Pelaksanaan Kegiatan Inovasi, Krenova, Pelaksanaan RIDA, IDSD,IPKD dan terlaksananya sosialisasi HKI	Jumlah dokumen/laporan video conference Kegiatan Inovasi, Krenova, Pelaksanaan RIDA, IDSD,IPKD dan terlaksananya sosialisasi HKI	3 dok/laporan	2	2	100%
Rata-rata Capaian						98,36%

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama adalah sebesar 98,36 % dengan kategori Sangat Tinggi/Sangat Berhasil.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam JF Pranata Komputer Pertama Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan target kinerja disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik tiap bulan atau per triwulan.
- b. Target kinerja mendukung dan selaras dengan target kinerja program kegiatan dan sub kegiatan struktur diatasnya.

Pekalongan, 03 Juli 2023

Mengetahui

ATASAN LANGSUNG KEPALA BIDANG
LITBANG

JF Pranata Komputer Pertama


Sevina Mahardini, S.T., M.T., M.Sc.
NIP. 19820925 200604 2 009


Angga Sultoni, S.Kom
NIP. 19891104 202012 1 010

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
JF PRANATA KOMPUTER PERTAMA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pranata Komputer Pertama Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa JF Pranata Komputer Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja JF Pranata Komputer Pertama melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 03 Juli 2023
JF Pranata Komputer Pertama



Danang Seno Aji, S.Kom
Penata Muda
NIP. 19911209 202012 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas Pokok.....	1
B. Struktur Jabatan.....	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A. Perjanjian Kerja.....	2
B. Capaian Kinerja.....	2
BAB III PENUTUP	4
A. Kesimpulan	4
B. Rekomendasi.....	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	1
---------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja JF Pranata Komputer Pertama Tahun 2023	2
Tabel 2. 2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	3
Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan II Tahun 2023	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, JF Pranata Komputer Pertama mempunyai uraian tugas jabatan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan draft dokumen laporan Data Prioritas Satu Data Terpadu Daerah
2. Melaksanakan pengolahan data form penyepakatan Satu Data Terpadu Daerah
3. Melaksanakan backup atau pemulihan data aplikasi Cascading Kinerja secara rutin

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan JF Pranata Komputer Pertama sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja JF Pranata Komputer Pertama Tahun 2023

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1.	Melaksanakan penyusunan draft dokumen laporan Data Prioritas Satu Data Terpadu Daerah	Jumlah draft dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun	1 dokumen
2.	Melaksanakan pengolahan data form penyepakatan Satu Data Terpadu Daerah	Jumlah Data Penyepakatan Satu Data Terpadu Daerah yang diolah	39 dokumen
3.	Melaksanakan backup atau pemulihan data aplikasi Cascading Kinerja secara rutin	Jumlah data yang dibackup/ dipulihkan	52 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2. 2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja JF Pranata Komputer Pertama
Triwulan II Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
1	Melaksanakan penyusunan draft dokumen laporan Data Prioritas Satu Data Terpadu Daerah	Jumlah draft dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun	1 dokumen	0	0	-
2	Melaksanakan pengolahan data form penyepakatan Satu Data Terpadu Daerah	Jumlah Data Penyepakatan Satu Data Terpadu Daerah yang diolah	39 dokumen	0	0	-
3	Melaksanakan backup atau pemulihan data aplikasi Cascading Kinerja secara rutin	Jumlah data yang dibackup/ dipulihkan	52 dokumen	13	13	100
Rata-rata Capaian						100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama pada triwulan keempat ini adalah sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi, adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target diantaranya:

1. Dukungan dari atasan yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas;
2. Pelaksanaan tugas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
3. Kerjasama yang baik dengan sesama rekan kerja.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam JF Pranata Komputer Pertama Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan target kinerja disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik tiap bulan atau per triwulan
2. Target kinerja mendukung dan selaras dengan target kinerja program kegiatan dan sub kegiatan struktur diatasnya

Pekalongan, 03 Juli 2023

Mengetahui
Plt. Kepala Bidang PPEPD,

JF Pranata Komputer Pertama,


Yogi Hardianto, S.Kom., M.Sc
NIP. 19860315 200902 1 001


Danang Seno Aji, S.Kom
NIP. 19911209 202012 1 011

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
JF PRANATA KOMPUTER PERTAMA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN**
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pranata Komputer Pertama Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa JF Pranata Komputer Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja JF Pranata Komputer Pertama melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 3 Juli 2023
JF Pranata Komputer Pertama



Hanif Parama Arta, S.Kom

Penata Muda

NIP. 19940423 202012 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok	1
B. Struktur Jabatan	1
BAB II	2
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A. Perjanjian Kerja	2
B. Capaian Kinerja	3
BAB III	5
PENUTUP	5
A. Kesimpulan	5
B. Rekomendasi	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja JF Pranata Komputer Pertama Tahun 2023	2
Tabel 2. 2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	3
Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan II Tahun 2023	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 Jabatan Fungsional Pranata Komputer, JF Pranata Komputer Pertama mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan instalasi/upgrade dan konfigurasi sistem operasi/aplikasi
2. Melakukan Pemeliharaan Infrastruktur TI
3. Menyiapkan Peralatan Video Conference (Vicon/Streaming), Monitoring Peralatan (Audio, Video, Dan Perangkat Jaringan), Dan Mengatur Layout
4. Melakukan Backup dan Pemulihan Data
5. Melakukan Manipulasi Data
6. Melakukan Pengumpulan Kebutuhan Informasi Data

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan JF Pranata Komputer Pertama sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja JF Pranata Komputer
Pertama Tahun 2023

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	Jumlah dokumen dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan disusun	1 Dokumen
2.	Tersusunnya dokumen laporan bidang pemerintahan	Jumlah dokumen dokumen laporan bidang pemerintahan yang disusun	1 Dokumen
3.	Terlaksananya kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah yang dilaksanakan	1 Kegiatan
4.	Terlaksananya instalasi/upgrade dan konfigurasi sistem operasi/aplikasi yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan pelaksanaan instalasi dan konfigurasi sistem informasi/aplikasi	6 Laporan
5.	Terlaksananya Pemeliharaan Infrastruktur TI yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen kegiatan perawatan	12 Dokumen
6.	Terfasilitasinya Video Conference(Vicon/Streaming), Monitoring Peralatan (Audio, Video, Dan Perangkat Jaringan), Dan Mengatur Layout yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan hasil pelaksanaan Video Conference (vicon)	28 Laporan
7.	Terlaksananya Backup dan Pemulihan Data yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen hasil backup atau pemulihan data	12 Dokumen
8.	Terlaksananya Manipulasi Data yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan manipulasi data	18 Laporan
9.	Terlaksananya Pengumpulan Kebutuhan Informasi Data yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Kebutuhan Informasi	24 Dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2. 2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja JF Pranata Komputer Pertama Triwulan II Tahun 2023

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tersusunnya dokumen koordinasi pembangunan bidang pemerintahan	Jumlah dokumen dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan disusun	1 Dokumen	0	0	0

No.	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Tersusunnya dokumen laporan bidang pemerintahan	Jumlah dokumen laporan bidang pemerintahan yang disusun	1 Dokumen	0	0	0
3.	Terlaksananya kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah yang dilaksanakan	1 Kegiatan	0	0	0
4.	Terlaksananya instalasi/upgrade dan konfigurasi sistem operasi/aplikasi yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan pelaksanaan instalasi dan konfigurasi sistem informasi/aplikasi	6 Laporan	1	1	100
5.	Terlaksananya Pemeliharaan Infrastruktur TI yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen kegiatan perawatan	12 Dokumen	3	3	100
6.	Terfasilitasinya Video Conference(Vicon/Streaming), Monitoring Peralatan (Audio, Video, Dan Perangkat Jaringan), Dan Mengatur Layout yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan hasil pelaksanaan Video Conference (vicon)	28 Laporan	7	7	100
7.	Terlaksananya Backup dan Pemulihan Data yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen hasil backup atau pemulihan data	12 Dokumen	3	3	100
8.	Terlaksananya Manipulasi Data yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan manipulasi data	18 Laporan	4	4	100
9.	Terlaksananya Pengumpulan Kebutuhan Informasi Data yang mendukung kegiatan Koordinasi dan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Kebutuhan Informasi	24 Dokumen	6	6	100
Rata-Rata Capaian						98%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama pada triwulan kedua ini adalah sebesar 98 % dengan kategori tinggi/berhasil.

Capaian kinerja tersebut didukung dengan kegiatan yang terdapat pada bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia dan kegiatan butir-butir pranata komputer yang saling bersinergi

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

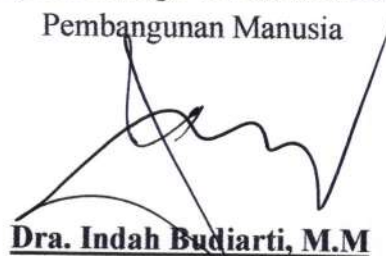
Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja JF Pranata Komputer Pertama adalah sebesar 98 % dengan kategori Tinggi/ Berhasil

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam JF Pranata Komputer Pertama Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan target kinerja disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik tiap bulan atau per triwulan
2. Target kinerja mendukung dan selaras dengan target kinerja program kegiatan dan sub kegiatan struktur diatasnya

Mengetahui
Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia



Dra. Indah Budiarti, M.M
NIP. 19701129 199703 2 002

Pekalongan, 3 Juli 2023

JF Pranata Komputer Pertama,



Hanif Parama Arta, S.Kom
NIP. 19940423 202012 1 012

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN**
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pranata Komputer Ahli Pertama mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 03 Juli 2023
Pranata Komputer Ahli Pertama



AHSANUL FIKRI, S.Kom

Penata Muda

NIP. 19950416 202012 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB II PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok	1
B. Struktur Jabatan	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	4
A. Perjanjian Kerja	4
B. Capaian Kinerja	5
BAB III PENUTUP	8
A. Kesimpulan	8
B. Rekomendasi	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	3
---------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Tahun 2023	4
Tabel 2. 2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	5
Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan II Tahun 2023	5

BAB II

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Pranata Komputer Ahli Pertama mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

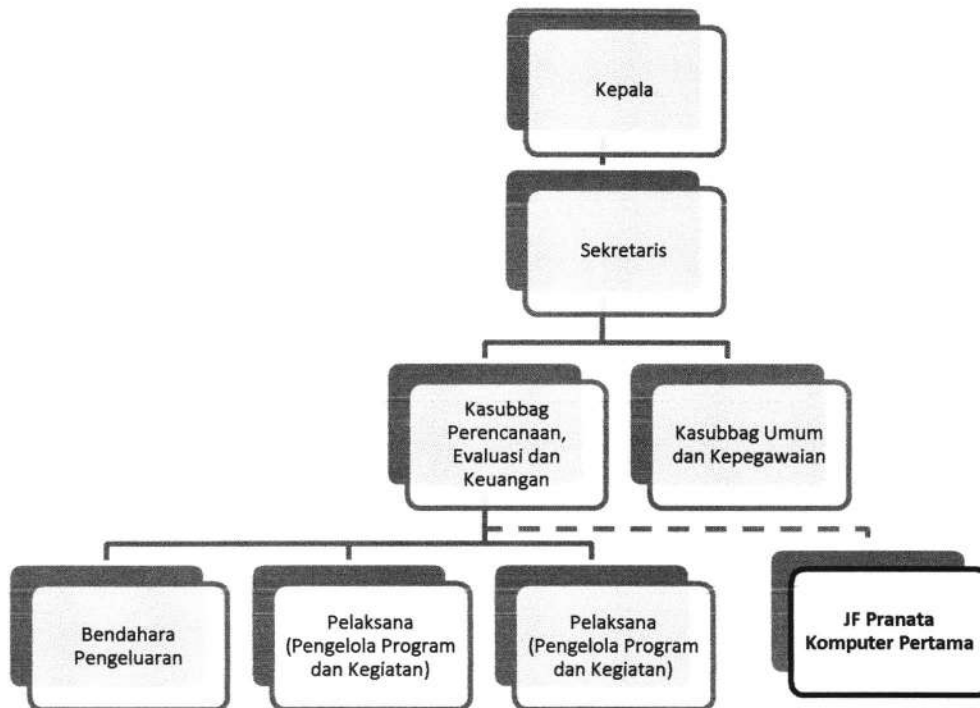
1. Mengelola katalog layanan teknologi informasi
2. Mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi
3. Menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data
4. Melakukan implementasi data model
5. Melakukan implementasi business intelligence
6. Menyusun taksonomi data
7. Menyusun arsitektur data
8. Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi
9. Melakukan perancangan layanan akses data
10. Melakukan implementasi rancangan layanan akses data
11. Melakukan ingestion data
12. Melakukan implementasi rancangan integrasi data
13. Menyusun prosedur pengujian rancangan integrasi data
14. Melakukan evaluasi hasil pengujian prosedur validasi kebutuhan informasi
15. Melakukan validasi kebutuhan informasi
16. Menyusun dokumentasi rancangan database
17. Melakukan instalasi dan konfigurasi DBMS
18. Melakukan backup atau pemulihan data
19. Menyusun tingkat kinerja layanan database
20. Melakukan peningkatan kinerja database
21. Menyusun rencana retensi data
22. Melakukan evaluasi teknologi data
23. Melakukan pengadministrasian teknologi data
24. Melakukan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data
25. Mengelola pengguna dan hak akses data
26. Menyusun pemetaan data berdasarkan tingkat kerahasiaan informasi
27. Melakukan pengumpulan data audit TI menggunakan metode tertentu
28. Menerapkan rancangan fisik sistem jaringan komputer kompleks
29. Menerapkan rancangan logis sistem pengamanan jaringan komputer kompleks
30. Menyusun prosedur pemanfaatan sistem jaringan
31. Melakukan uji coba sistem jaringan komputer kompleks
32. Melakukan evaluasi uji coba sistem jaringan komputer sederhana
33. Menyusun dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer
34. Melakukan optimalisasi sistem jaringan

35. Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan kompleks
36. Melakukan pemeriksaan kesesuaian antara Infrastruktur TI dengan spesifikasi teknis
37. Melakukan pengujian infrastruktur TI
38. Melakukan pemeliharaan infrastruktur TI
39. Melakukan pemasangan infrastruktur TI
40. Melakukan pengaturan akses keamanan fisik TI
41. Melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan infrastruktur TI
42. "Menyusun prosedur pemanfaatan infrastruktur TI"
43. Menyiapkan peralatan video conference (vicon /streaming), monitoring peralatan (audio, video, dan perangkat jaringan), mengatur layout
44. Melakukan optimalisasi kinerja infrastruktur TI
45. Melakukan perancangan sistem informasi
46. Membuat program aplikasi sistem informasi
47. Mengembangkan program aplikasi sistem informasi
48. Melakukan penyiapan data untuk uji coba sistem informasi
49. Melakukan uji coba sistem informasi
50. Melakukan deteksi dan atau perbaikan kerusakan sistem informasi
51. Menyusun petunjuk operasional program aplikasi sistem informasi
52. Menyusun dokumentasi pengembangan sistem informasi
53. Melakukan instalasi/upgrade dan konfigurasi sistem operasi/aplikasi
54. Melakukan data crawling, data feeding, data loading
55. Melakukan manipulasi data
56. Menyusun definisi sistem proyeksi pada suatu data spasial
57. Membuat peta tematik rinci
58. Melakukan pengolahan data atribut dan spasial rinci
59. Mengoperasikan tools untuk membuat storyboard
60. Membuat flowchart untuk pemrograman multimedia
61. Melakukan editing objek multimedia kompleks dengan piranti lunak
62. Membuat objek multimedia kompleks dengan piranti lunak
63. Membuat prototype kompleks pada program multimedia
64. Membuat program multimedia kompleks

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi SIM-UMK	Jumlah dokumentasi hasil pengembangan program aplikasi sistem informasi	18 dokumen
2	Melaksanakan backup atau pemulihan data aplikasi SIM-UMK secara rutin	Jumlah dokumen hasil backup atau pemulihan data	52 dokumen
3	Menyediakan SPP beserta kelengkapannya yang terdiri dari SPP UP, GU, TU, LS dan Nihil yang akuntabel	Jumlah dokumen SPP UP, GU, TU, LS dan Nihil yang dibuat	80 dokumen
4	Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan BPKAD	Jumlah rekonsiliasi keuangan yang dilaksanakan	4 kali
5	Melaksanakan input dokumen penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen yang diinput ke dalam aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1500 dokumen
6	Menyediakan draft Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD yang akuntabel	Jumlah draft Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD yang disusun	4 dokumen
7	Melaksanakan Validasi Kebutuhan Informasi data SDTD	Jumlah Dokumen hasil validasi kebutuhan informasi data SDTD	1 dokumen
8	Melaksanakan pembuatan Obyek Multimedia Kompleks Dengan Peranti Lunak	Jumlah Dokumen obyek multimedia kompleks	12 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2. 2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2. 3 Pengukuran Kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan II Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
1	Melaksanakan Pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi SIM-UMK	Jumlah dokumentasi hasil pengembangan program aplikasi sistem informasi	18 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100,00%
2	Melaksanakan backup atau pemulihan data aplikasi SIM-	Jumlah dokumen hasil backup atau	52 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	100,00%

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Capaian
	UMK secara rutin	pemulihan data				
3	Menyediakan SPP beserta kelengkapannya yang terdiri dari SPP UP, GU, TU, LS dan Nihil yang akuntabel	Jumlah dokumen SPP UP, GU, TU, LS dan Nihil yang dibuat	80 dokumen	40 dokumen	35 dokumen	87,50%
4	Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan BPKAD	Jumlah rekonsiliasi keuangan yang dilaksanakan	4 kali	2 kali	2 kali	100,00%
5	Melaksanakan input dokumen penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen yang diinput ke dalam aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1500 dokumen	750 dokumen	757 dokumen	100,93%
6	Menyediakan draft Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD yang akuntabel	Jumlah draft Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
7	Melaksanakan Validasi Kebutuhan Informasi data SDTD	Jumlah Dokumen hasil validasi kebutuhan informasi data SDTD	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100,00%
8	Melaksanakan pembuatan Obyek Multimedia Kompleks Dengan Peranti Lunak	Jumlah Dokumen obyek multimedia kompleks	12 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100,00%
Rata-rata Capaian						98,55%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama pada triwulan pertama ini adalah sebesar 98,55% dengan kategori sangat

tinggi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama, antara lain:

1. Kemampuan teknis: Pranata Komputer Ahli Pertama memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengembangan program aplikasi, backup dan pemulihan data, serta pembuatan obyek multimedia. Hal ini memungkinkan Pranata Komputer Ahli Pertama untuk melaksanakan tugas dengan baik dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Ketersediaan sumber daya: Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Pranata Komputer Ahli Pertama memiliki akses terhadap sumber daya yang memadai seperti perangkat lunak, perangkat keras, serta data dan informasi yang diperlukan. Ketersediaan sumber daya yang memadai memungkinkan Pranata Komputer Ahli Pertama untuk melaksanakan tugas dengan baik dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Kepatuhan terhadap prosedur dan standar: Pranata Komputer Ahli Pertama patuh terhadap prosedur dan standar yang telah ditetapkan oleh instansi atau SKPD. Hal ini memungkinkan Pranata Komputer Ahli Pertama untuk melaksanakan tugas dengan baik dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan cara yang benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Motivasi dan komitmen: Pranata Komputer Ahli Pertama memiliki motivasi yang tinggi dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dengan baik. Hal ini memungkinkan Pranata Komputer Ahli Pertama untuk terus berupaya meningkatkan kinerjanya dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
5. Dukungan dari atasan dan rekan kerja: Pranata Komputer Ahli Pertama mendapatkan dukungan yang memadai dari atasan dan rekan kerjanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dukungan tersebut dapat berupa bimbingan, arahan, maupun kolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya. Hal ini memungkinkan Pranata Komputer Ahli Pertama untuk melaksanakan tugas dengan baik dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pranata Komputer Ahli Pertama adalah sebesar 98,55% dengan kategori Sangat Tinggi

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pranata Komputer Ahli Pertama Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan target kinerja disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik tiap bulan atau per triwulan
2. Target kinerja mendukung dan selaras dengan target kinerja program kegiatan dan sub kegiatan struktur diatasnya

Pekalongan, 03 Juli 2023

Mengetahui
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan
Keuangan,



Wahyudi Subiyantoro, S.Pi.,MPA

NIP. 19731020 200501 1 006

Pranata Komputer Ahli Pertama,



Ahsanul Fikri, S.Kom

NIP. 19950416 202012 1 015

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH**



PERMADANI FITRI APRILLIA, S.E
NIP. 19910415 202012 2 019

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran



Permadani Fitri Aprillia, S.E

NIP. 19910415 202012 2 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	6
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Gambar	1
----------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2023	3
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	4
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Triwulan I Tahun 2023	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No. 86 Tahun 2022 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan objek kerja;
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
3. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja;
4. Menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
5. Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan obyek kerja;
6. Menyusun Kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan obyek kerja;
7. Mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menerima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan objek kerja	Jumlah bahan dan data obyek kerja yang diperiksa	5 dokumen
2	Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	Jumlah bahan dan data obyek kerja yang diklasifikasikan	5 dokumen
3	Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja	Jumlah bahan obyek yang dipelajari	5 dokumen
4	Menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan	Jumlah konsep obyek yang disusun	5 dokumen
5	Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan obyek kerja	Jumlah konsep obyek yang didiskusikan	5 dokumen
6	Menyusun Kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan	Jumlah obyek yang disusun kembali	5 dokumen

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
	optimalisasi penyusunan obyek kerja		
7	Mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	Jumlah obyek yang dievaluasi	5 dokumen
8	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah bulan pelaporan hasil pelaksanaan tugas	12 bulan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
Triwulan II Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
1	Mencrima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan objek kerja	Jumlah bahan dan data obyek kerja yang diperiksa	5 dokumen	0	0	-
2	Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	Jumlah bahan dan data obyek kerja yang diklasifikasikan	5 dokumen	0	0	-
3	Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja	Jumlah bahan obyek yang dipelajari	5 dokumen	0	0	-
4	Menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan	Jumlah konsep obyek yang disusun	5 dokumen	0	0	-
5	Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan obyek kerja	Jumlah konsep obyek yang didiskusikan	5 dokumen	0	0	-
6	Menyusun Kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan obyek kerja	Jumlah obyek yang disusun kembali	5 dokumen	0	0	-
7	Mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai	Jumlah obyek yang dievaluasi	5 dokumen	0	0	-

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
	bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran					
8	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah bulan pelaporan hasil pelaksanaan tugas	12 bulan	6 bulan	6 bulan	100%
Rata-rata Capaian						100%

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa seluruh target telah tercapai 100% dengan kategori “sangat berhasil”, adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target diantaranya :

1. Adanya Kerjasama yang baik dengan bidang -bidang terkait, terutama dalam pemenuhan dokumen/data OPD yang dibutuhkan untuk Kota Pekalongan
2. Pelaksanaan tugas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sehingga memungkinkan penyelesaian tugas secara optimal
3. Selalu meng-update peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja agar sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran adalah sebesar 100% dengan kategori "sangat berhasil"

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan bisa tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

Mengetahui

ATASAN LANGSUNG
Plt. Kabid PPEPD,

Penyusun Rencana Kegiatan dan
Anggaran,


Yogi Hardianto, S.Kom, M.Sc
NIP. 19860315 200902 1 001


Permadani Fitri Aprillia, S.E
NIP. 19910415 202012 2 019

**LAPORAN KINERJA
ANALIS PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA
TRIWULAN II TAHUN 2023**



**BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pekalongan Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada khususnya bahwa Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pekalongan pada Triwulan II Tahun 2023 melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

ANALIS PERENCANAAN BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BAPPEDA KOTA PEKALONGAN



AYU CAHYANING KESUMA, SE.

Penata Muda

NIP. 19960101 202012 2 034

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Jabatan	1
B. Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A. Perjanjian Kinerja	4
B. Capaian Kinerja	4
BAB III PENUTUP	7
A. Kesimpulan	7
B. Rekomendasi	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	3
-------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Analisis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2023	4
Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal	5
Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Analisis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Triwulan II Tahun 2023	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

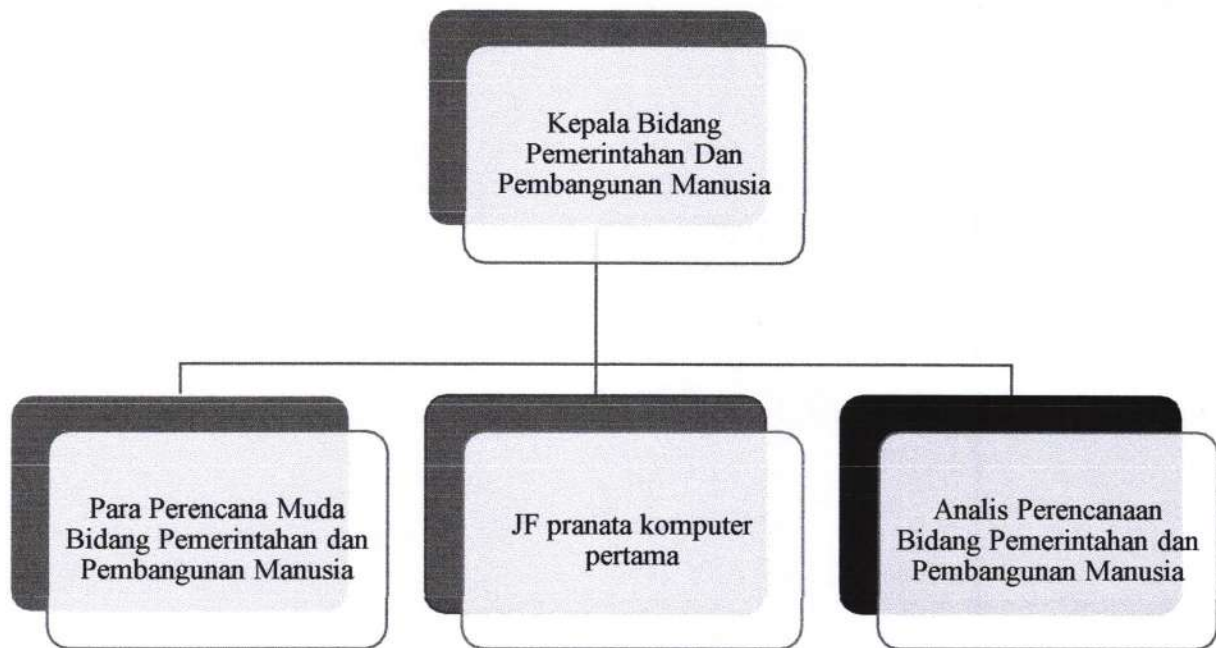
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan, Analisis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas jabatan sebagai berikut:

1. Tersusunnya dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan;
2. Tersusunnya dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia;
3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan;

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Analisis Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Pekalongan



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Analis Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan	Dokumen	1 Dokumen
2	Tersusunnya dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia	Dokumen	1 Dokumen
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	Kali	1 Kali

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Analis Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Analisis Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Triwulan I Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Analisis Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia triwulan II Tahun 2023

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s/d Triwulan II	Realisasi s/d Triwulan II	% Capaian
1	Tersusunnya dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-
2	Tersusunnya dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	Kali	1 Kali	0 Kali	0 Kali	-
Rata-rata Capaian						-

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Analis Perencanaan pada Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia, adalah sebesar (-). Target capaian kinerja tahunan baru akan terealisasi pada triwulan IV Tahun 2023, sehingga capaian kinerja pada triwulan II belum dapat dihitung.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Analis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan bisa tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

Mengetahui :

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA



Dra. INDAH BUDIARTI, MM
NIP. 19701129 199703 2 002

ANALIS PERENCANAAN BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA



AYU CAHYANING KESUMA, SE.
NIP. 19960101 202012 2 034

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
CALON AHLI PERTAMA PERENCANA



Rolan Firmanasari
NIP. 19890720 202203 2 007

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Calon Ahli Pertama Perencana Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Calon Ahli Pertama Perencana mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Calon Ahli Pertama Perencana melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 3 Juli 2023

Calon Ahli Pertama Perencana



Rolan Firmanasari

(Penata Muda)

NIP. 19890720 202203 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Pokok	1
B Struktur Jabatan	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	3
A Perjanjian Kinerja	3
B Capaian Kinerja	3
BAB III PENUTUP	6
A Kesimpulan	6
B Rekomendasi	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

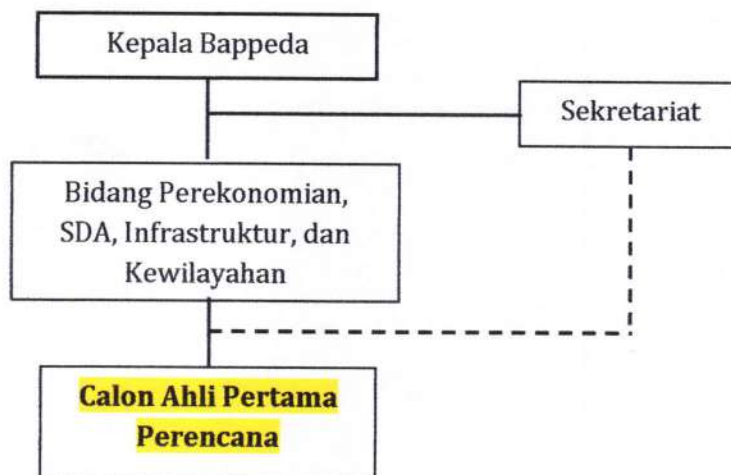
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan Ahli Pertama Perencana mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Permasalahan
2. Merumuskan Permasalahan
3. Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder
4. Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer
5. Mengolah Data dan Informasi
6. Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data
7. Menganalisis Data dan Informasi
8. Menyajikan Data dan Informas
9. Melakukan Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana
10. Melakukan Persiapan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan
11. Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Ahli Pertama Perencana, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Calon Ahli Pertama Perencana pada Sub Bagian Pengembangan Wilayah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Calon Ahli Pertama Perencana pada
Sub Bidang Pengembangan Wilayah
Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah bahan kerja yang tersusun	1 dokumen
2	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan yang tersusun	1 dokumen

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Calon Ahli Pertama Perencana pada Sub Bagian Pengembangan Wilayah Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Calon Ahli Pertama Perencana pada Sub Bagian Pengembangan Wilayah Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Calon Ahli Pertama Perencana
Triwulan II Tahun 2023

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah bahan kerja yang tersusun	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-

No	Butir Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target s.d Triwulan II	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
2	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan yang tersusun	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-
Rata-rata Capaian						-

Target kinerja tahunan akan terealisasi pada Triwulan IV Tahun 2023 sehingga capaian kinerja pada Triwulan II belum dapat dihitung. Meskipun target kinerja belum dapat dihitung namun dalam rangka pencapaian target kinerja tahunan sudah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja pada Triwulan II sebesar 0 (nol) laporan sedangkan realisasinya sebesar 0 (nol) laporan sehingga capaian kinerja tidak dapat dihitung.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Calon Ahli Pertama Perencana pada Sub Bagian Pengembangan Wilayah Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan bisa tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

Mengetahui

Mengetahui

Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan
Infrastruktur Wilayah,

Calon Ahli Pertama Perencana,



IMRON ROSYIDI, S. Pi, M. App. Sc.
NIP. 19780529 200212 1 003



ROLAN FIRMANASARI, S.PWK.
NIP. 19890720 202203 2 007

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
CALON AHLI PERTAMA PERENCANA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Calon Ahli Pertama Perencana Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Calon Ahli Pertama Perencana mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Calon Ahli Pertama Perencana melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 03 Juli 2023

Calon Ahli Pertama Perencana



Lena Juliana Mardiyana, S.E.

Penata Muda

NIP. 19980702 202203 2 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Tugas Jabatan	1
B Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A Perjanjian Kinerja	2
B Capaian Kinerja	2
BAB III PENUTUP	5
A Kesimpulan	5
B Rekomendasi	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

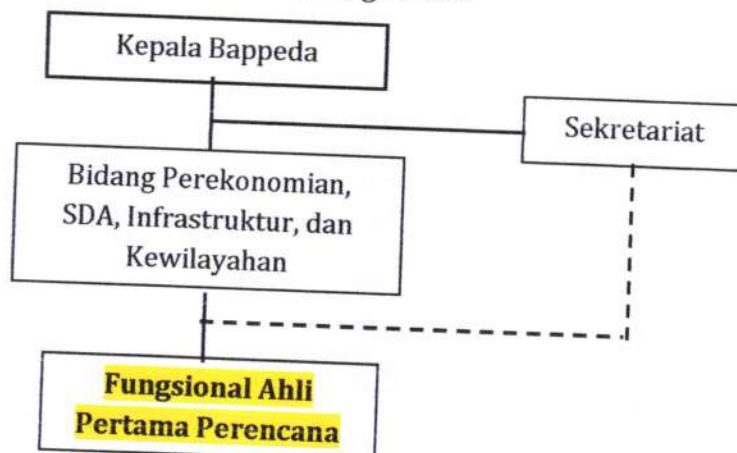
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan Ahli Pertama Perencana mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Permasalahan
2. Merumuskan Permasalahan
3. Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder
4. Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer
5. Mengolah Data dan Informasi
6. Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data
7. Menganalisis Data dan Informasi
8. Menyajikan Data dan Informas
9. Melakukan Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana
10. Melakukan Persiapan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan
11. Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Ahli Pertama Perencana, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Calon Ahli Pertama Perencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Calon Ahli Pertama Perencana
Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah bahan dokumen kerja kajian pasca kegiatan penanganan banjir dan rob Kali Loji dan Kali Banger yang transparan dan akuntabel	1 laporan
2	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah bahan laporan koordinasi bidang infrastruktur yang transparan dan akuntabel	1 laporan

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Calon Ahli Pertama Perencana Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Calon Ahli Pertama Perencana Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Calon Ahli Pertama Perencana
Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
1	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Jumlah bahan dokumen kerja kajian pasca kegiatan penanganan banjir dan rob Kali Loji dan Kali Banger yang transparan dan akuntabel	1 laporan	0 laporan	0 laporan	-
2	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan	Jumlah bahan laporan koordinasi bidang infrastruktur	1 laporan	0 laporan	0 laporan	-

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
	pembangunan daerah bidang infrastruktur yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	yang transparan dan akuntabel				
	Rata-rata Capaian					-

Target kinerja tahunan akan terealisasi pada Triwulan IV Tahun 2023 sehingga capaian kinerja pada Triwulan II belum dapat dihitung. Meskipun target kinerja belum dapat dihitung namun dalam rangka pencapaian target kinerja tahunan sudah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja pada Triwulan II sebesar 0 (nol) laporan sedangkan realisasinya sebesar 0 (nol) laporan sehingga capaian kinerja tidak dapat dihitung.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Calon Ahli Pertama Perencana Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan agar sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan
2. Perlu evaluasi tiap bulannya agar capaian target triwulanan bisa tercapai dan dikoreksi apabila ada kendala dalam pelaksanaan

Pekalongan, 03 Juli 2023

Mengetahui

Kabid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur
dan Kewilayahan,

Calon Ahli Pertama Perencana,



IMRON ROSYIDI, S. Pi. M. App. Sc.
NIP. 19780529 200212 1 003



LENA JULIANA MARDIYANA, S.E.
NIP. 19980702 202203 2 018